

**PENGARUH PAJAK REKLAME, PAJAK RESTORAN,
RETRIBUSI JASA UMUM, JUMLAH PENDUDUK, DAN
JUMLAH INDUSTRI TERHADAP PENDAPATAN ASLI
DAERAH (PAD) KABUPATEN SLEMAN,
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN 2011-2015**

SKRIPSI



DISUSUN OLEH:

IRFAN MUSLIM

NIM: 09312480

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2017

HALAMAN PENGESAHAN

**PENGARUH PAJAK REKLAME, PAJAK RESTORAN,
RETRIBUSI JASA UMUM, JUMLAH PENDUDUK, DAN
JUMLAH INDUSTRI TERHADAP PENDAPATAN ASLI
DAERAH (PAD) KABUPATEN SLEMAN,
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN 2011-2015**

SKRIPSI

Ditulis dan diajukan untuk memenuhi syarat ujian akhir guna memperoleh gelar Sarjana Strata-1 di Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Indonesia.

Oleh:


IRFAN MUSLIM

NIM: 09312480

JURUSAN AKUNTANSI

Telah diperiksa dan disahkan oleh Dosen Pembimbing
Yogyakarta, 27 Februari 2017

Dosen Pembimbing



Yunan Najamudin, Drs., M.B.A.

PERNYATAAN BEBAS PLAGIRISME

Saya, yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri (ASLI) dan di dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu institusi pendidikan tinggi mana pun, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis dan/atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Segala sesuatu yang terkait dengan naskah dan karya yang telah dibuat adalah menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Yogyakarta, *27 FEBRUARI 2017*...



IRFAN MUSLIM
NIM: 09312480

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR /SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL

**PENGARUH PAJAK REKLAME, PAJAK RESTORAN RETRIBUSI JASA UMUM,
JUMLAH PENDUDUK, DAN JUMLAH INDUSTRI TERHADAP PENDAPATAN ASLI
DAERAH (PAD) KABUPATEN SLEMAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN
2011-2015**

Disusun Oleh : **IRFAN MUSLIM**

Nomor Mahasiswa : **09312480**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan **LULUS**

Pada hari Kamis, tanggal: 9 Maret 2017

Penguji/ Pembimbing Skripsi : Yunan Najamuddin, Drs., MBA.

Penguji : Reni Yendrawati, Dra., M.Si.



Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Indonesia



Agus Harjito, M.Si.

MOTTO

“Seungguhnya urusan-nya apabila Dia menghendaki sesuatu Dia hanya berkata kepadanya, “Jadilah!” maka jadilah sesuatu itu”

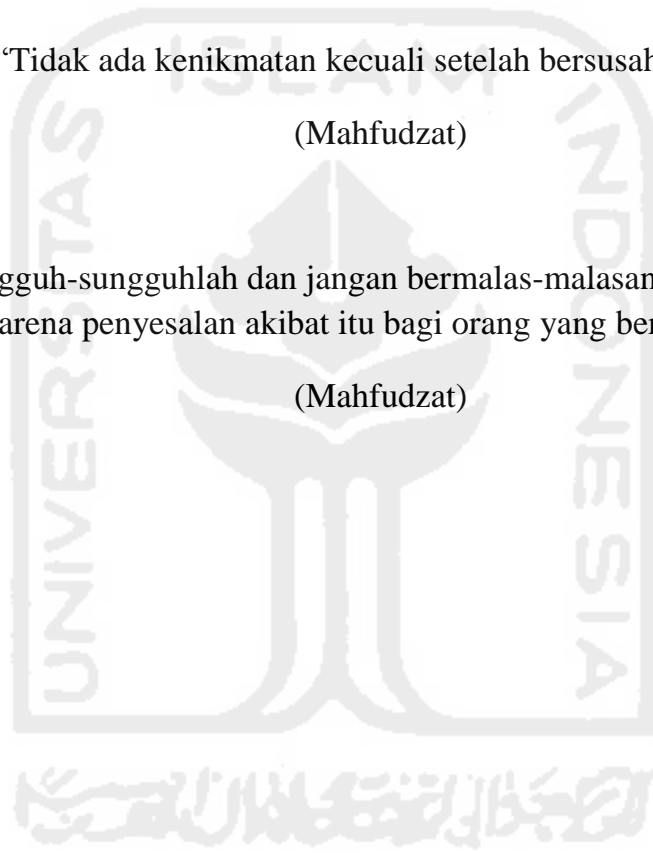
(QS. Yasin 36:82)

“Tidak ada kenikmatan kecuali setelah bersusah payah”

(Mahfudzat)

“Bersungguh-sungguhlah dan jangan bermalas-malasan dan jangan pula lengah karena penyesalan akibat itu bagi orang yang bermalas-malasan”

(Mahfudzat)



HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya kecil dan sederhana ini saya persembahkan dengan penuh rasa cinta kepada sosok-sosok berikut ini:

1. Ayah dan Ibu tercinta
2. Kakak – Kakakku dan adikku tersayang
3. Istri dan anakku yang sangat kubanggakan
4. Almamaterku, FE UII Yogyakarta



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil 'alamiin. Segala puji hanya untuk Allah, Tuhan seru sekalian alam. Atas pertolongan, kemudahan, dan petunjuknya, penelitian berjudul Pengaruh Pajak Reklame, Pajak Restoran, Retribusi Jasa Umum, Jumlah Penduduk, dan Jumlah Industri terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sleman DIY ini bisa dirampungkan juga. Semoga, pada tahap ujian pendadaran skripsi, penulis bisa lulus dengan nilai maksimal. Harapannya, hasil penelitian ini bisa bermanfaat bagi pembaca yang lebih luas dan beragam.

Penelitian ini menghasilkan tiga temuan pokok. Pertama, pajak reklame, pajak restoran, retribusi jasa umum, jumlah penduduk, dan jumlah industri secara serentak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Sleman. Ini terlihat dari hasil uji F. Nilai F hitung sebesar 55,923 lebih besar dari nilai F kritis 2,39. Kedua, pajak reklame, pajak restoran, jumlah penduduk, dan jumlah industri tidak berpengaruh terhadap PAD Kabupaten Sleman. Ketiga, semua variabel penelitian lolos uji normalitas, heterokedastisitas dan autokorelas. Sebagian uji multikolinearitas tidak memenuhi persyaratan (jumlah penduduk dan industri).

Laporan skripsi ini musykil diselesaikan bila tanpa uluran tangan sejumlah pihak. Untuk itulah, penulis bermaksud mengucapkan simpati dan rasa terimakasih kepada sosok-sosok berikut:

1. Dosen Pembimbing Skripsi, Bapak Yunan Najamuin, Drs.,M.B.A. yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing penulis menuntaskan pekerjaan ini.

2. Ayahku Drs Sofian dan Ibuku Ratna Juwita tercinta, yang tak kenal lelah mendoakan penulis.
3. Istriku Efrida Hadiyani dan Anakku Muhammad fajri Zaidan tersayang.
4. Kakak – Kakakku Lia amali, Arfiani gozali, Arfiana Fajar indah dan Adikku Fikri Addiani tercinta.
5. Teman - teman seperjuangan : Rahmat Holili, Anshori Akbana, Rangga Pramadya Anutuh, Toufik ikram Jamil, Kasful Anwar, Hendro Presetyo, Shafaat Akbar, Shalahuddin Muhammad, Hasnan Ghifari, Riza Rais, dan Rangga Adi terima kasih atas support yang telah diberikan selama ini.
6. Staf Biro Pusat Statistik Yogyakarta, Dinas Pendapatan Daerah Kabupten Sleman, Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman, dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman.
7. Dan semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.

Besar harapan penulis semoga laporan skripsi ini bisa barakah dan bermanfaat. Penulis bersedia menerima kritik dan saran yang membangun atas segala kekurangan laporan skripsi ini. Pepatah menekankan, tiada gading yang tak retak. Demikian pula halnya laporan skripsi ini, tak luput dari kelemahan.

Yogyakarta, Februari 2017

Irfan Muslim

DAFTAR ISI

Halaman Cover.....	i
Halaman Judul	ii
Halaman LembarPengesahan.....	iii
Halaman Pernyataan Keaslian.....	iv
Halaman BeritaAcaraUjianPendadaran	v
Halaman Motto.....	vi
HalamanPersembahan	vii
KataPengantar	viii
Daftar Isi	x
DaftarTabel	xii
DaftarGambar	xiii
DaftarLampiran	xiv
Abstrak.....	xv
Abstrak	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Sistematika Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Landasan Teori	11
1. Pajak Daerah	11
a. Pengertian Pajak Daerah	11
b. Jenis Pajak Daerah	12
c. Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12
2. Pajak Reklame	13
3. Pajak Restoran	16
4. Retribusi Daerah	17
a. Subyek Retribusi dan Wajib Retribusi Daerah	18
b. Objek Retribusi Daerah	18
1) Retribusi Jasa Umum	19
2) Retribusi Jasa Usaha	19
3) Retribusi Perizinan Tertentu	20
c. Besarnya Retribusi	21
5. Jumlah Penduduk	22
6. Jumlah Industri	22
7. Pendapatan Asli Daerah	23
a. Pengertian PAD.....	23
b. Sumber-sumber PAD	24
c. Hasil Perusahaan Daerah	24

d. Lain-lain Hasil Usaha Daerah yang Sah	25
B. Review Penelitian Terdahulu	26
C. Hipotesis Penelitian	28
BAB III METODE PENELITIAN	29
A. Jenis Penelitian	29
B. Variabel-variabel Penelitian	29
C. Jenis dan Sumber Data.....	30
D. Populasi dan Sampel Penelitian	30
1. Populasi	30
2. Sampel	31
E. Teknik Pengumpulan Data	31
F. Teknik Analisis Data	32
1. Alat Analisis	32
2. Uji Prasyarat Analisis	32
a. Uji Normalitas	33
b. Uji Autokorelasi	33
c. Uji Multikolinearitas	35
d. Uji Heterokedastisitas	36
3. Analisis Regresi Linier Berganda	36
4. Uji Koefisien Determinasi (R^2)	37
a. Uji Hipotesis Serentak (Uji F)	38
b. Uji t	39
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	46
A. Hasil Penelitian.....	46
1. Uji Prasyarat Analisis.....	47
2. Koefisien Regresi	52
3. Pengujian Koefisien regresi Secara Serentak (Uji F).....	54
4. Pengujian Koefisien Regresi Secara Parsial (Uji t)	57
5. Pengujian Koefisien Determinasi	66
B. Pembahasan.....	67
1. Pengaruh Pajak Reklame terhadap PAD Sleman	67
2. Pengaruh Pajak Restoran terhadap PAD Sleman	68
3. Pengaruh Retribusi Jasa Umum terhadap PAD Sleman	69
4. Pengaruh Jumlah Penduduk terhadap PAD Sleman.....	70
5. Pengaruh Jumlah Industri terhadap PAD Sleman	70
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	72
A. Kesimpulan	72
B. Saran	73

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Review Penelitian Terdahulu.....	26
Tabel 4.1 Pengujian Multikolinearitas	49
Tabel 4.2 Pengujian Autokorelasi	51
Tabel 4.3 Koefisien Uji Regresi Linier Berganda	53
Tabel 4.4 Hasil Uji F	55
Tabel 4.5 Hasil Uji Parsial (Uji t)	58
Tabel 4.6 Hasil Uji Koefisien Determinasi	67



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1	Statistik d Durbin-Watson	34
Gambar 3.2	Daerah Penerimaan dan Penolakan Hipotesis Uji Serentak.....	39
Gambar 3.3	Daerah Penerimaan dan Penolakan Hipotesa Pajak Reklame	42
Gambar 3.4	Daerah Penerimaan dan Penolakan Hipotesa Pajak Restoran.....	42
Gambar 3.5	Daerah Penerimaan dan Penolakan Hipotesa Ret. Jasa Umum	43
Gambar 3.6	Daerah Penerimaan dan Penolakan Hipotesa Jumlah Penduduk..	44
Gambar 3.7	Daerah Penerimaan dan Penolakan Hipotesa Jumlah Industri.....	44
Gambar 3.8	Daerah Penerimaan dan Penolakan Hipotesa Pajak Reklame, Pajak Restoran, Retribusi Jasa Umum, Jumlah Penduduk, Jumlah Industri dan PAD	45
Gambar 4.1	Grafik Pengujian Normalitas	47
Gambar 4.2	Grafik Pengujian Heterokedastisitas	50
Gambar 4.3	Daerah Uji Autokorelasi	52
Gambar 4.4	Daerah Penerimaan dan Penolakan Uji F	56
Gambar 4.5	Daerah Penerimaan dan Penolakan Uji t Pajak Reklame	59
Gambar 4.6	Daerah Penerimaan dan Penolakan Uji t Pajak Restoran	60
Gambar 4.7	Daerah Penerimaan dan Penolakan Uji t Ret. Jasa Umum.....	62
Gambar 4.8	Daerah Penerimaan dan Penolakan Uji t Jumlah Penduduk.....	64
Gambar 4.9	Daerah Penerimaan dan Penolakan Uji t Jumlah Industri.....	66

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Tabulasi Data Penelitian
- Lampiran 2 Hasil Uji Regresi Linier Berganda
- Lampiran 3 Surat Permohonan Pengambilan Data
- Lampiran 4 Surat Permohonan Pengambilan Data
- Lampiran 5 Surat Izin Pengambilan Data



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pajak reklame, pajak restoran, retribusi jasa umum, jumlah penduduk, dan jumlah industri terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Sleman baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri. Juga meneliti faktor-faktor apa saja yang berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Sleman.

Penelitian dilakukan di wilayah Kabupaten Sleman selama lima tahun berturut-turut, dari tahun 2011-2015. Jenis penelitian ialah penelitian korelasi dengan menggunakan data time series. Teknik pengumpulan data terdiri dari dokumentasi dan studi pustaka. Teknik analisis data yang digunakan ialah analisis regresi linier berganda.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara bersama-sama (serentak), pajak reklame, pajak restoran, retribusi jasa umum, jumlah penduduk, dan jumlah industri berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Sleman. Ini terlihat dari hasil uji F. Nilai F hitung sebesar 55,923. Lebih besar dari nilai F kritis 2,39. Secara sendiri-sendiri (parsial), pajak reklame, pajak restoran, jumlah industri dan jumlah penduduk tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Sleman. Nilai t kritis ialah 2,005 lebih besar dari nilai t hitung untuk keempat variabel bebas tersebut (pajak reklame hanya 1,975, pajak restoran - 0,022, jumlah penduduk 1,494, dan jumlah industri 0,948). Namun, secara parsial, retribusi jasa umum berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Sleman, dengan nilai t hitung sebesar 4,148. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Sleman mencakup rincian peraturan daerah yang berlaku untuk setiap pos penerimaan pajak, dan implementasinya di lapangan dan juga realita berupa jumlah penduduk yang bermukim di wilayah Sleman yang cukup besar.

Kata kunci: pajak reklame, pajak restoran, retribusi jasa umum, jumlah penduduk, jumlah industri, pendapatan asli daerah, Sleman, time series.

ABSTRACT

This study aimed at understanding the effects of advertising tax, restaurant tax, public service retribution, population number, and industry number to regional original revenue of Sleman Regency, both partially and simultaneously. It also studies what factors affected to the regional original revenue in Sleman.

This research was conducted in Sleman Regency for five years, from 2011-2015. Type of this research is correlation by using time series data. Data collection techniques consist of documentation and library study. Data analysis technique used is multiple regression analysis.

As results, it has been shown that simultaneously, advertising tax, restaurant tax, public service retribution, population number, and industry number affected regional original revenue of Sleman Regency. It was seen from F test. F test is 55.923, bigger than t critical 2.39. Partially, advertising tax, restaurant tax, population number, and industry number did not affect to regional original revenue of Sleman Regency. T critical was 2.005, bigger than t table for the four independent variables (advertising tax only 1.975, restaurant tax -.022, population number 1.494, and industry number .948). However, on the same time, public service retribution affected to regional original revenue of Sleman Regency with t table 4.148. Factors affecting to the regional original revenue of Sleman Regency include details of regional rules for each tax acceptance post, and their implementation, as well as reality in the form of population number who stay in Sleman is great enough.

Keywords: advertising tax, restaurant tax, public service retribution, population number, industry number, regional original revenue, Sleman, time series.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Implementasi UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU Pemda) dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Pemerintah Daerah (selanjutnya disebut UU Perimbangan Keuangan) telah menyebabkan perubahan mendasar mengenai pengaturan pengaruh pusat dan daerah, khususnya administrasi pemerintahan dan pengaruh keuangan. Era yang menandai pergeseran ini lebih dikenal sebagai otonomi daerah. Dengan berlakunya otonomi daerah, daerah dituntut bekerja lebih baik dan optimal dalam upaya-upaya dan terobosan-terobosan terkait peningkatan pendapatan asli daerah (selanjutnya disebut PAD). Pemerintah daerah tidak lagi bisa selalu mengandalkan bantuan dari pusat. Salah satu sumber PAD berasal dari sektor pajak dan retribusi. Jenis pajak dan retribusi bermacam-macam, sesuai dengan potensi, karakteristik, sumberdaya, dan kebijakan setiap daerah.

Pajak dan retribusi telah diatur dalam UU No. 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas UU No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (selanjutnya disebut UU Perubahan Pajak dan Retribusi Daerah). Pajak reklame adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku,

digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. Jenis-jenis pajak daerah mencakup pajak reklame, pajak hotel dan restoran, pajak kendaraan bermotor, pajak swalayan dan sejenisnya. Sementara, retribusi daerah ialah retribusi jasa umum yaitu retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh pribadi atau badan. Jenis-jenis retribusi jasa umum meliputi retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pelayanan kebersihan, retribusi pergantian cetak KTP, retribusi pelayanan pasar, retribusi parkir di jalan umum dan masih banyak lagi.

Pengaturan dan perincian jenis-jenis pajak dan retribusi bertujuan untuk meningkatkan proporsi PAD secara signifikan untuk pembiayaan bermacam kegiatan pelayanan publik dan pembangunan daerah. Merujuk pada Garis-garis Besar Haluan Negara (1999), pembangunan daerah merupakan bagian dari integrasi dan penjabaran pembangunan nasional demi mencapai sasaran pembangunan yang disesuaikan dengan potensi, aspirasi, dan permasalahan pembangunan daerah. Oleh sebab itu, pemerintah daerah dituntut bekerja keras untuk memaksimalkan PAD masing-masing.

Jadi, PAD berperan amat penting karena merupakan sumber pembiayaan pemerintah daerah dan tolak ukur pelaksanaan otonomi daerah. Dalam riset ini, peneliti memanfaatkan variabel pajak reklame, pajak restoran, retribusi jasa umum, jumlah penduduk, dan jumlah industri di Kabupaten Sleman. Diasumsikan bahwa pajak reklame dan pajak restoran memberikan sumbangsih terbesar bagi penerimaan PAD. Retribusi jasa umum lebih

dipengaruhi oleh tingkat kesadaran masyarakat dan keadaan ekonomi sehingga diasumsikan memberikan kontribusi di bawah pajak reklame dan pajak restoran. Di lain sisi, jumlah penduduk dan jumlah industri merupakan faktor penunjang pajak dan retribusi karena kapasitas keduanya sebagai subjek dan objek dari pajak dan/atau retribusi. Keberadaan sejumlah industri dan penduduk di kawasan Kabupaten Sleman akan secara langsung berkaitan erat dengan realisasi pemasukan daerah, khususnya dari pajak reklame, pajak restoran, dan retribusi jasa umum. Alhasil, PAD harus ditinjau dari (1) pajak reklame, pajak restoran, dan retribusi jasa umum dan juga (2) jumlah penduduk dan jumlah industri.

Sleman adalah pemerintahan daerah tingkat dua setara kabupaten dan/atau kotamadya di wilayah administratif Daerah Istimewa Yogyakarta. Secara geografis, Sleman berbatasan secara langsung dengan Kabupaten Boyolali dan Kotamadya Salatiga (di utara dan timur), Kabupaten Klaten dan Kabupaten Sukoharjo (di timur), Kabupaten Bantul dan Kotamadya Yogyakarta (di selatan), dan Kabupaten Magelang (di barat). Sebagian wilayah Sleman termasuk daerah perkotaan yang berkembang dengan pesat karena adanya sekolah, kampus, dan universitas dan juga dilalui jalan-jalan besar sebagai jalur transportasi utama dari dan menuju Daerah Istimewa Yogyakarta. Keberadaan institusi-institusi pendidikan di wilayah Sleman telah mendorong pertumbuhan sekian banyak usaha kecil dan menengah (seperti warung makan dan restoran, angkringan, kafe, lapangan futsal), beragam bisnis (seperti usaha cetak, fotocopy dan penjilidan, warung internet dan

games, gerai ponsel dan barang-barang elektronik, gerai penyedia layanan telekomunikasi), warung makan, restoran, dan kafe, asrama/pondokan/rumah kos/kontrakan bagi pelajar dan mahasiswa, dan sebagainya.

Kompetisi bermacam usaha kecil dan menengah, bisnis, dan pusat-pusat pelayanan jasa tersebut di wilayah Sleman sangat ketat. Selain berebut ruang geografis yang strategis, mudah dijangkau, relatif murah, aman dan nyaman, dan menawarkan keunggulan bersaing yang kompetitif, mereka harus berlomba memperebutkan pangsa konsumen yang sama. Biasanya, persaingan berlangsung di antara sesama jenis usaha/bisnis. Misalnya, warung makan, kafe, dan restoran akan saling bersaing satu sama lain untuk menjajakan pelayanan dan jasa terbaik demi mendapatkan keuntungan optimal.

Untuk menjajakan usaha, mereka harus melakukan promosi, pemasaran, dan penawaran yang gencar, intensif, dan kompetitif. Salah satunya melalui papan reklame. Di satu sisi, menjamurnya beragam usaha dan bisnis di wilayah Sleman telah mendorong pertumbuhan masif dan ekspansif papan-papan reklame. Misalnya, di pinggir sepanjang jalan Gejayan (kini Jalan Affandi) akan dijumpai ratusan papan reklame yang menawarkan bermacam produk dan/atau jasa. Bisa dikatakan, lingkungan dan ruang perkotaan Sleman telah dijejali “sampah” reklame dengan beragam ukuran, warna, motif, dan penawaran. Di lain sisi, keberadaan papan-papan reklame ini telah membuka peluang pendapatan asli daerah yang baru bagi pemerintah daerah Sleman melalui pajak reklame.

Pemerintah daerah Sleman telah menerbitkan bermacam peraturan daerah untuk mengatur reklame dan pajak reklame. Peraturan daerah itu meliputi: (1) Perda No. 10 Tahun 1998 tentang Pajak Reklame, (2) Perda No. 5 Tahun 2002 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Dati II Sleman No. 10 Tahun 1998 tentang Pajak Reklame, (3) Perda No. 14 Tahun 2003 tentang Izin Reklame, (4) Perda No 15 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Titik Reklame, (5) Keputusan Bupati Sleman No. 70/Kep.KDH/A/2003 tentang Lokasi Reklame, (6) Keputusan Bupati Sleman No. 3/Kep.KDH/1/2004 tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, (7) Perda No 4 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame dan (8) Perda No 3 Tahun 2015 tentang Izin Pemanfaatan Ruang. Salah satu tujuan pokok penerbitan bermacam peraturan daerah dan keputusan bupati ini ialah pemberdayaan potensi, sumberdaya, dan pendapatan asli daerah melalui pajak reklame.

Pajak restoran diatur dalam (1) Perda No 2 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran dan (2) Perda No 15 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Usaha Hiburan Umum, Rumah Makan, Restoran dan Hotel Pada Bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri. Menurut Haris Sutarta, Kepala Bidang Pendaftaran dan Pendataan, Dinas Pendapatan Daerah Sleman, berdasarkan Perda Nomor 2 Tahun 2011 mengenai Pajak Restoran, ketentuan-ketentuan dalam perda dimaksudkan bagi para penjual makanan yang menyediakan tempat makan tersendiri. Meskipun tidak berada di kios atau dalam ruangan, pajak itu tetap berlaku (Republika, edisi Senin, 4 Maret 2013, diunduh dari laman republika.co.id pukul 22:59 WIB).

Haris Sutarta (2013) menambahkan bahwa ada sejumlah pengecualian bagi rumah makan yang omsetnya di bawah Rp 600.000 per hari. Sayangnya, PKL selalu berpindah-pindah tempat dalam memilih area berjualan, sehingga sulit bagi Dispenda mendata dan mendaftarkan mereka dalam kategori wajib pajak. Masih banyak usaha yang belum membayar pajak restoran.

Pada saat bersamaan, keberadaan usaha dan/atau bisnis terkait institusi pendidikan di wilayah Sleman telah ikut mendorong pertumbuhan masif dan ekspansif kebutuhan akan pelayanan dan jasa-jasa relevan lainnya. Permintaan masyarakat lokal dan/atau pendatang terhadap pelayanan dan jasa-jasa ini terbilang tinggi. Misalnya, parkir, stasiun pengisian bahan-bakar utama, pasar, mall, swalayan dan hypermart, kartu identitas penduduk sementara, sampah, dan sejenisnya.

Bila tidak diatur dengan sebaik-baiknya melalui implementasi manajemen dan kebijakan daerah yang terpadu, komprehensif, dan berdaya guna, maka permintaan masyarakat tersebut akan menimbulkan permasalahan baru yang spesifik, entah di ranah sosial, politik, ekonomi ataupun budaya. Sampah misalnya, bila tidak ditangani dengan baik akan menyebabkan permasalahan terkait sanitasi dan higienis lingkungan serta kesehatan, kebersihan dan keindahan pemandangan, dan konflik terkait lainnya. Demikian pula parkir, pelayanan pendidikan dan sejenisnya.

Sejumlah perda Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman terkait retribusi jasa umum di antaranya: (1) Perda No 5/2013 tentang Retribusi Pelayanan Pendidikan, (2) Perda No 6/2012 tentang Retribusi Terminal, (3) Perda No

3/2012 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, (4) Perda No 9/2012 tentang Retribusi Izin Trayek, (5) Perda No 8/2012 tentang Retribusi Izin Gangguan, (6) Perda No 7/2012 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan, (7) Perda No 5/2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, (8) Perda No 4/2012 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, (9) Perda No 2/2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar, (10) Perda No 16/2011 tentang Retribusi Pengolahan Limbah Cair, (11) Perda No 15/2011 tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat, (12) Perda No 14/2011 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil, (13) Perda No 13/2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, (14) Perda No 12/2010 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, (15) Perda No 15/2013 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir, (16) Perda No. 16/2013 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asingdan sebagainya.

Pemerintah daerah Sleman lantas mengeluarkan peraturan daerah dan kebijakan terkait retribusi pengelolaan bermacam jasa dan pelayanan tersebut. Misalnya, perda pajak hiburan, perda retribusi izin gangguan usaha, perda retribusi tempat khusus parkir, dan retribusi perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing. Seperti halnya pajak reklame dan pajak restoran, persoalan retribusi daerah harus diatur sedemikian rupa sehingga bisa dioptimalkan kegunaannya sebagai salah satu pos PAD.

Diasumsikan terdapat pengaruh antara pajak reklame, pajak restoran, retribusi jasa umum, jumlah penduduk dan jumlah industri, baik secara

bersama-sama maupun secara parsial terhadap PAD Kabupaten Sleman. Agar pengaruh dan pengaruh kausalitas antara kelima variabel bisa ditelaah dan digambarkan dengan memadai, dibutuhkan rentang waktu yang mencukupi untuk penelitian ilmiah.

Penelitian serupa pernah dilakukan oleh Waluyo (2011) di wilayah Kotamadya Depok, Jawa Barat. Rentang waktu penelitian Waluyo (2011) ialah lima tahun, dari tahun 2006-2010. Secara singkat, hasil penelitian Waluyo (2011) menegaskan bahwa (1) secara serentak terdapat pengaruh antara pajak reklame, pajak restoran, retribusi jasa umum, jumlah penduduk, dan jumlah industri terhadap pendapatan asli daerah Kota Depok, (2) dari kelima variabel bebas yang diteliti (pajak reklame, pajak restoran, retribusi jasa umum, jumlah penduduk dan jumlah industri) hanya pajak restoran yang berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah Kota Depok, dan (3) koefisien determinasi mencapai angka 96,3%. Penelitian ini bermaksud mereplikasi penelitian Waluyo (2011) dan memverifikasi hasil-hasilnya. Melalui penelitian ini, bisa diketahui apakah hasil-hasil penelitian ini akan mirip dengan penelitian Waluyo (2011) atau berlainan. Oleh sebab itulah, peneliti mengajukan penelitian berjudul “Pengaruh Pajak Reklame, Pajak Restoran, Retribusi Jasa Umum, Jumlah Penduduk, dan Jumlah Industri terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sleman Periode 2011-2015”.

B. Rumusan Masalah

Peneliti mengajukan enam rumusan masalah penelitian, meliputi:

1. Adakah pengaruh pajak reklame terhadap PAD Kabupaten Sleman?
2. Adakah pengaruh pajak restoran terhadap PAD Kabupaten Sleman?
3. Adakah pengaruh retribusi jasa umum terhadap PAD Kabupaten Sleman?
4. Adakah pengaruh jumlah penduduk terhadap PAD Kabupaten Sleman?
5. Adakah pengaruh jumlah industri terhadap PAD Kabupaten Sleman?
6. Adakah pengaruh pajak reklame, pajak restoran, retribusi jasa umum, jumlah penduduk dan jumlah industri secara serentak terhadap PAD Kabupaten Sleman?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui pengaruh pajak reklame terhadap PAD Kabupaten Sleman.
2. Mengetahui pengaruh pajak restoran terhadap PAD Kabupaten Sleman.
3. Mengetahui pengaruh retribusi jasa umum terhadap PAD Kabupaten Sleman.
4. Mengetahui pengaruh jumlah penduduk terhadap PAD Kabupaten Sleman.
5. Mengetahui pengaruh jumlah industri terhadap PAD Kabupaten Sleman.
6. Mengetahui pengaruh pajak reklame, pajak restoran, retribusi jasa umum, jumlah penduduk, dan jumlah industri secara simultan terhadap PAD Kabupaten Sleman.

D. Manfaat Penelitian

Riset ini memiliki dua manfaat pokok, secara akademik dan secara praktis. Manfaat akademik merujuk ke institusi pendidikan, khususnya Universitas Islam Indonesia. Diharapkan, skripsi bisa memberi sumbangsih pemikiran dan hasil-hasil riset ilmiah terkait pengaruh pajak reklame, pajak restoran, retribusi jasa umum, jumlah penduduk, dan jumlah industri terhadap PAD Kabupaten Sleman. Diharapkan pula kontribusi demikian memberikan andil bagi perkembangan ilmu ekonomi dan/atau kebijakan publik. Manfaat praktis lebih ditujukan pada jajaran eksekutif dan legislatif pemerintah daerah Sleman yang memiliki kapasitas pengambilan keputusan terkait PAD.

E. Sistematika Penulisan

Laporan penelitian akan disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab 1 Pendahuluan, berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan

Bab 2 Tinjauan Pustaka, berisi landasan teori, review penelitian terdahulu dan hipotesis penelitian

Bab 3 Metode Penelitian, berisi jenis penelitian, variabel-variabel penelitian, jenis dan sumber data, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data

Bab 4 Hasil Penelitian dan Pembahasan, berisi hasil penelitian dan pembahasan

Bab 5 Penutup, berisi kesimpulan dan saran

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Pajak Daerah

a. Pengertian Pajak Daerah

Menurut UU No. 34/2000 dan PP No 66/2001, pajak daerah ialah iuran wajib yang dilakukan orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, dapat dilaksanakan sesuai Peraturan Perundang-undangan, untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah (Bratakusumah, 2002: 265). Sebagai salah satu PAD, pajak daerah diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembantuan daerah, guna menambah dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat. Kota/ Kabupaten diberi peluang dalam menggali potensi sumber-sumber keuangan dengan menetapkan jenis pajak selain yang telah ditetapkan asalkan memenuhi kriteria dan sesuai dengan aspirasi masyarakat.

Kriteria pajak daerah selain yang ditetapkan Kabupaten/Kota meliputi:

(1) bersifat pajak dan bukan retribusi, (2) objek pajak ada di wilayah Kabupaten/Kota itu, mempunyai mobilitas cukup rendah dan hanya melayani masyarakat di sana, (3) objek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum, (4) bukan objek pajak propinsi dan/atau pusat dan (5) potensinya memadai.

b. Jenis Pajak Daerah

Sesuai Pasal 2 ayat (1) UU No. 34/2000 jenis pajak provinsi meliputi: (1) pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, (2) bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, (3) pajak bahan bakar kendaraan bermotor dan (4) pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan permukaan. Menurut Pasal 2 ayat (2) UU No. 34/ 2000 jenis pajak Kabupaten/Kota terdiri dari: (a) pajak hotel, (b) pajak restoran, (c) pajak hiburan, (d) pajak reklame, (e) pajak penerangan jalan, (f) pajak pengambilan bahan galian golongan C dan (g) pajak parkir.

c. Subjek pajak dan wajib pajak daerah

Menurut Pasal 3 PP No 65/2001 subjek pajak dan wajib pajak adalah:

- 1) Subjek pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air adalah orang-orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor dan kendaraan di air. Wajib pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air.
- 2) Subjek bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air wajib pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang menerima penyerahan kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air
- 3) Subjek pajak bahan bakar kendaraan bermotor wajib pajaknya ialah orang pribadi atau badan yang memakai kendaraan bermotor

- 4) Subjek pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan wajib pajaknya orang pribadi atau badan yang mengambil atau memanfaatkan air bawah tanah atau air permukaan
- 5) Subjek pajak hotel wajib pajaknya adalah pengusaha hotel
- 6) Subjek pajak restoran wajib pajaknya adalah pengusaha restoran
- 7) Subjek pajak hiburan wajib pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan
- 8) Subjek pajak reklame wajib pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame.
- 9) Subjek pajak penerangan jalan wajib pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang menjadi pelanggan dan/atau pengguna listrik
- 10) Subjek pajak pengambilan bahan galian golongan C wajib pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan pengambilan bahan galian golongan C
- 11) Subjek pajak parkir wajib pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan tempat parkir.

2. Pajak Reklame

Ketentuan-ketentuan mengenai pajak reklame di Sleman diatur dalam Perda No. 4 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame. Menurut pasal 1 ayat (6) Perda No. 4/2011, pajak reklame ialah pajak atas penyelenggaraan reklame. Menurut pasal 1 ayat (7), reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang bagi tujuan

komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan/atau dinikmati oleh umum.

Menurut pasal 2, dengan nama pajak reklame dipungut pajak atas setiap penyelenggaraan reklame. Menurut pasal 3 ayat (1), objek pajak ialah semua penyelenggaraan reklame, meliputi: (a) reklame papan/*bill-board videotron/megatron* dan sejenisnya, (b) reklame kain, (c) reklame melekat, stiker, (d) reklame selebaran, (e) reklame berjalan, termasuk pada kendaraan, (f) reklame udara, (g) reklame apung, (h) reklame suara, (i) reklame film/slide, dan (j) reklame peragaan. Menurut pasal 3 ayat (2), tidak termasuk sebagai objek pajak adalah: (a) penyelenggaraan reklame lewat internet, TV, radio, warta harian, mingguan, bulanan, dan sejenisnya, (b) label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi membedakan dari produk sejenis lainnya, (c) nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi dengan ukuran tidak lebih dari 1 (satu) meter persegi, (d) reklame dalam rangka kegiatan sosial, keagamaan, politik dan kebudayaan yang tidak mencari keuntungan.

Menurut pasal 4, subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan reklame. Menurut pasal 5 ayat (1), wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame. Menurut pasal 5 ayat (2) dalam hal reklame diselenggarakan sendiri secara langsung oleh orang pribadi atau badan, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan

tersebut. Menurut pasal 5 ayat (3), dalam hal reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga, pihak ketiga tersebut menjadi wajib pajak.

Ketentuan-ketentuan dalam pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

- (1) Dasar pengenaan pajak adalah nilai sewa reklame.
- (2) Dalam hal reklame dilihat pihak ketiga, nilai sewa reklame seperti dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak reklame.
- (3) Dalam hal reklame dilihat sendiri, nilai sewa reklame seperti dimaksud ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor sebagai berikut: (a) jenis reklame, (b) harga bahan yang digunakan, (c) lokasi penempatan, (d) waktu, (e) jangka waktu penyelenggaraan, (f) jumlah, (g) ukuran media reklame.
- (4) Dalam hal nilai sewa reklame seperti maksud ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Ketentuan-ketentuan dalam pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

- (1) Nilai sewa reklame dihitung dengan rumus:

Nilai sewa reklame = koefisien jenis reklame x harga bahan x lokasi penempatan x waktu x jangka waktu penyelenggaraan x jumlah reklame x ukuran media reklame.

- (2) Nilai sewa reklame untuk penyelenggaraan reklame di dalam ruangan ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai nilai sewa reklame dan hasil perhitungannya diatur dengan Peraturan Bupati.

Menurut pasal 8, tarif pajak ditetapkan sebesar 25%.

3. Pajak Restoran

Ketentuan-ketentuan pajak restoran di Sleman diatur dalam Perda No. 2 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran. Merujuk pada ketentuan Pasal 1 ayat (6) Perda No. 2/2011, pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan restoran. Merujuk ayat (7), restoran ialah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.

Menurut pasal 2 Perda No. 2/2011, dengan nama pajak restoran dipungut pajak atas setiap pelayanan yang disediakan oleh restoran dengan pembayaran. Pasal 3 Perda No 2/2011 menyatakan: (1) objek pajak adalah pelayanan yang disediakan restoran, (2) pelayanan restoran seperti maksud ayat (1) meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi pembeli, di tempat pelayanan maupun di tempat lain termasuk jasa boga/catering dan (3) tidak termasuk objek pajak seperti maksud ayat (1) ialah pelayanan restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi batas Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per bulan.

Menurut pasal 4 Perda No. 2/2011, ayat (1) subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari

restoran. Menurut ayat (2), wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran. Pasal 5 menegaskan dasar pengenaan pajak ialah jumlah pembayaran yang diterima atau seharusnya diterima restoran.

Menurut pasal 6, tarif pajak ditetapkan 10%. Menurut pasal 7, besaran pokok pajak terutang dihitung dengan mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Menurut pasal 8, pajak terutang dipungut di wilayah tempat restoran berlokasi. Menurut pasal 9, masa pajak ialah jangka waktu selama satu bulan kalender, yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak terutang.

Menurut pasal 29 ayat (1), hasil penerimaan pajak dialokasikan 10% dengan peruntukan: (a) 1% bagi wajib pajak berprestasi yang memenuhi kewajiban perpajakan dan (b) 9% bagi kegiatan promosi wisata daerah. Artinya, **pajak restoran tak sepenuhnya memberi penambahan pada pos pemasukan PAD sebesar 100%, sebab sudah dikurangi 10%**. Dengan kata lain, **pos pemasukan PAD Sleman dari pajak restoran hanya 90%**. Menurut pasal 29 ayat (2), ketentuan lebih lanjut mengenai alokasi hasil penerimaan pajak diatur dengan Peraturan Bupati.

4. Retribusi Daerah

Menurut UU No 34/2000, retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi daerah diharapkan menjadi salah satu sumber

pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, Kabupaten/Kota diberi peluang dalam menggali potensi sumber-sumber keuangan dengan menetapkan jenis retribusi selain yang telah ditetapkan, sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat (Bratakusumah, 2002: 266).

a. Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi Daerah

Berdasarkan Pasal 18 UU No 34/2000 terdiri dari: (1) subjek retribusi umum: orang pribadi/badan yang memakai atau menikmati pelayanan jasa umum. Subjek retribusi jasa umum dapat merupakan wajib pajak retribusi jasa umum, (2) subjek retribusi jasa usaha adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan jasa usaha bersangkutan. Subjek ini dapat merupakan wajib retribusi jasa usaha, (3) subjek retribusi perizinan tertentu adalah orang pribadi/badan yang memperoleh izin tertentu dari Pemerintah Daerah, subjek ini bisa merupakan wajib retribusi jasa perizinan tertentu.

b. Objek Retribusi Daerah

Sesuai Pasal 18 UU No. 34/2000, objek retribusi ialah berbagai jenis jasa tertentu yang diserahkan pemerintah daerah. Tidak semua yang diberikan pemerintah daerah dapat dipungut retribusi, hanya jenis-jenis jasa tertentu yang menurut perkembangan sosial ekonomi layak dijadikan sebagai objek retribusi jasa tertentu entah jasa umum, jasa usaha, dan perizinan tertentu.

1) Retribusi Jasa Umum

Retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi/badan. Objek retribusi jasa umum ialah pelayanan yang disediakan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum dan bisa dinikmati orang pribadi/badan. Jenis-jenis Retribusi Jasa Umum di Sleman meliputi: (a) retribusi pelayanan kesehatan (Perda 10/2002), (b) retribusi pelayanan persampahan/kebersihan (Perda 13/2011), (c) retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil, (Perda 14/2011), (d) retribusi pelayanan pemakaman dan penguburan mayat (Perda 15/2011), (e) retribusi pelayanan parkir ditepi jalan umum, (f) retribusi pelayanan pasar (Perda 2/2012), (g) retribusi pengujian kendaraan bermotor (Perda 3/2012), (h) retribusi pelayanan pendidikan (Perda 5/2012).

2) Retribusi Jasa Usaha

Retribusi jasa usaha-usaha ialah atas jasa yang disediakan pemerintah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Objek retribusi usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah menganut prinsip komersial meliputi: (a) pelayanan dengan memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara

optimal dan (b) pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum memadai disediakan oleh pihak swasta.

Jenis-jenis Retribusi Jasa Usaha ialah: (a) retribusi pemakaian kekayaan daerah (Perda 5/2012), (b) retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan, (c) retribusi tempat pelanggan, (d) retribusi terminal (Perda 6/2012), (e) retribusi tempat khusus parkir (Perda 15/2013), (f) retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa, (g) retribusi penyedotan kakus, (h) retribusi rumah potong hewan (Perda 7/2012), (i) retribusi pelayanan pelabuhan kapal, (j) retribusi tempat rekreasi dan olah raga (Perda 12/2010), (k) retribusi penyeberangan di atas air, (l) retribusi pengolahan limbah cair (Perda 16/2011), (m) retribusi penjualan produksi usaha daerah.

3) Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi perizinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemda dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk pembinaan pengaturan pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang penggunaan sumberdaya alam, barang, prasarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Objeknya ialah kegiatan tertentu Pemda dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumberdaya alam, barang, prasarana atau fasilitas

tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Retribusi perizinan tertentu untuk daerah propinsi dan daerah kabupaten/kota ditetapkan sesuai dengan kewenangan masing-masing daerah.

Jenis-jenis retribusi perizinan tertentu meliputi: (a) retribusi izin mendirikan bangunan, (b) retribusi izin tempat penjualan minimum beralokasi, (c) retribusi izin gangguan diatur dalam Perda 8/2012, (d) retribusi izin trayek diatur dalam Perda No 9/2012. Selain jenis retribusi yang ditetapkan dalam PP No 66/2001, dengan perda dapat ditetapkan jenis retribusi lainnya misalnya penerimaan negara bukan pajak yang telah diserahkan kepada daerah.

c. Besarnya Retribusi

Sesuai PP No. 66/2001, besarnya retribusi yang tertuang orang pribadi/badan yang memakai jasa atau perizinan tertentu dihitung dengan mengalikan tarif retribusi dengan tingkat penggunaan jasa. Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi jasa umum didasarkan pada kebijaksanaan daerah dengan mempertahankan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan. Jadi, daerah berwenang menetapkan prinsip dan sasaran yang akan dicapai. Dalam menetapkan tarif retribusi jasa umum, seperti untuk bagian atau sama dengan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan dan membantu golongan masyarakat kurang mampu

sesuai jenis pelayanan yang dibedakan menurut jenis pelayanan dalam jasa yang bersangkutan dan golongan pengguna jasa sebagai contoh:

- 1) Tarif retribusi persampahan bagi golongan masyarakat mampu dipatok lebih tinggi untuk menutup biaya pengumpulan, transportasi dan pembuangan sampah bagi golongan masyarakat kurang mampu.
- 2) Tarif rawat inap kelas tinggi ditetapkan lebih besar daripada biaya pelayanannya, untuk subsidi tarif rawat inap kelas lebih rendah.
- 3) Tarif retribusi parkir di tepi jalan rawan kemacetan dipatok lebih tinggi daripada di tepi jalan umum yang kurang rawan kemacetan.

5. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk dipahami sebagai data penduduk yang menetap dan tercatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman atau Biro Pusat Statistik, selama periode 2011-2015. Data jumlah penduduk diukur dalam satuan jiwa atau orang.

6. Jumlah Industri

Jumlah industri dipahami sebagai jumlah usaha industri entah kecil, menengah ataupun besar yang terletak di wilayah Sleman. Data jumlah industri diukur dalam satuan unit. Selain harus di wilayah administratif Sleman, jumlah industri harus tercatat di dinas-dinas terkait. Jadi, industri-industri yang belum atau tidak tercatat, walau ada di wilayah Sleman dan termasuk rentang waktu penelitian akan cenderung diabaikan.

7. Pendapatan Asli Daerah

a. Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Selain alokasi anggaran dari pusat, PAD merupakan sumber penerimaan yang mendukung kemampuan keuangan daerah. PAD penting dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Kemampuan keuangan dari PAD menjadi variabel pengukuran kemampuan daerah guna melaksanakan tugas dan kewenangan otonomi dari pusat. Dalam rangka mengatur urusan rumah tangganya, pemda perlu meningkatkan PAD lewat pemberdayaan BUMD dan potensi-potensi PAD yang berasal dari pajak, retribusi, dan lain-lain (Rianto, 2000: 65).

Menurut Pasal 6 Ayat (1) UU No. 33/2004, sumber-sumber berasal dari: (a) pajak daerah, (b) retribusi daerah, (c) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan (d) lain-lain PAD yang sah. Menurut ayat (2), lain-lain PAD yang sah meliputi: (a) hasil penjualan daerah yang tidak dipisahkan, (b) jasa giro, (c) pendapatan bunga, (d) keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan (d) komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.

Seluruh organisasi pemerintah daerah harus berperan aktif dan bertanggung jawab sepenuhnya dalam upaya-upaya peningkatan PAD. Secara struktural formal, badan atau dinas pemerintahan daerah yang secara langsung mengurus PAD ialah Dispenda Sleman. Tugas pokok dan fungsi setiap Dispenda ialah melakukan pemungutan

pendapatan daerah secara resmi sesuai payung hukum dan berkoordinasi dengan instansi lain dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pemungutan pendapatan daerah (Rianto, 2000: 66).

b. Sumber-Sumber PAD

Sumber-sumber pembiayaan pelaksanaan desentralisasi terdiri dari PAD, dana perimbangan, pinjaman daerah dan lain-lain penerimaan yang sah. Sumber PAD merupakan sumber keuangan daerah yang digali dari dalam wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.

Sebagai daerah otonom yang mempunyai hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri maka pendapatan daerah sangatlah penting dalam rangka pembiayaan urusan rumah tangga daerah. Daerah dapat menggali sumber pendapatan asli daerah dari: (a) Pajak Daerah, (b) Retribusi Daerah, (c) Hasil Perusahaan Daerah dan (d) Lain-lain usaha yang sah.

c. Hasil Perusahaan Daerah

Dalam penjelasan umum UU No. 5/1962, Perusahaan Daerah adalah semua perusahaan atau badan yang modalnya baik seluruhnya maupun sebagiannya, merupakan kegiatan daerah yang dipisahkan. Pemda dapat bertindak selaku pemilik penuh perusahaan atau pemilik sebagian saham. Perusahaan daerah bertujuan turut serta

melaksanakan pembangunan daerah dan pembangunan ekonomi nasional.

Perusahaan daerah mencakup berbagai kegiatan perekonomian yang luas, tidak hanya pada penyediaan kebutuhan dasar masyarakat daerah. Jenis-jenis Perusahaan Daerah di Indonesia meliputi kegiatan: (a) jenis air minum, (b) pengelolaan persampahan, (c) pengelolaan air kotor, (d) pengelolaan pasar, (e) penyediaan transportasi, (f) perbankan dan perkreditan, (g) rumah pemotongan hewan, (h) pengelolaan objek wisata, (i) pengelolaan sarana wisata, (j) industri lain, (k) jasa lainnya.

d. Lain-lain Hasil Usaha Daerah yang Sah

Lain-lain hasil usaha daerah yang sah ialah hasil daerah dari usaha perangkat Pemda dan bukan merupakan hasil kegiatan dan kewenangan perangkat Pemda. Hal-hal menyangkut usaha daerah yang sah adalah: (a) usaha daerah dilakukan aparat pemda menghasilkan barang atau jasa yang dapat digunakan masyarakat dengan ganti rugi dan (b) usaha daerah sebagai sumber pendapatan daerah harus dimasukkan pada kas daerah. Hasil usaha daerah yang sah meliputi: (a) hasil penjualan milik daerah, (b) penggantian biaya prakwalifikasi, (c) penggantian biaya dokumen lelang, (d) jasa Giro, (e) sewa rumah dinas/sewa beli rumah, (f) uang administrasi berat, (g) iuran tetap dan iuran produksi, (h) sewa gudang pabrik, (i) penerimaan lain-lain.

B. Review Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1. Review Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti	Judul	Variabel Bebas	Uji F	Uji t	
					Signifikan	Tak Signifikan
1	Budi Waluyo (2011)	Pengaruh Pajak Reklame, Pajak Restoran, Retribusi Jasa Umum, Jumlah Penduduk, dan Jumlah Industri terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2015	Pajak Reklame	Berpengaruh		v
			Pajak Restoran			v
			Retribusi Jasa Umum		v	
			Jumlah Penduduk			v
			Jumlah Industri			v
2	Siti Rochimah, Kharis Raharjo, dan Abrar Oemar (2013)	Pengaruh Pajak Hotel dan Restoran, Retribusi Daerah, dan Pajak Daerah terhadap PAD pada Kabupaten/Kota Propinsi Jawa Tengah Tahun 2007-2012	Pajak Hotel	Berpengaruh		v
			Pajak Restoran			v
			Retribusi Daerah		v	
			Pajak Daerah		v	
3	Desak Made Karyani (2012)	Pengaruh Retribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Dinas Pendapatan Kabupaten Morowali	Retribusi Parkir	Tidak berpengaruh		v
			Retribusi Pasar			v
4	Mawar Dwi Putrany (2008)	Pengaruh Penerimaan Pajak Reklame dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah, Pada Suku Dinas Pendapatan Daerah Kodya Jakarta Barat II	Pajak Reklame	Tidak berpengaruh		v
			Pajak Restoran			v
5	Faizah Wachdin (2010)	Pengaruh Pajak Reklame dan Pajak Hiburan terhadap PAD Kota Surabaya, Studi Pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya	Pajak Reklame	Tidak berpengaruh		v
			Pajak Hiburan			v

1. Budi Waluyo (2011) meneliti Pengaruh Pajak Reklame, Pajak Restoran, Retribusi Jasa Umum, Jumlah Penduduk dan Jumlah Industri terhadap PAD Kota Depok. Hasilnya, secara serentak pajak reklame, pajak restoran, retribusi jasa umum, jumlah penduduk dan jumlah industri berpengaruh terhadap PAD Kota Depok. Secara parsial, pajak restoran berpengaruh terhadap PAD Kota Depok. Pajak reklame, retribusi jasa umum, jumlah penduduk dan jumlah industri tidak berpengaruh terhadap PAD Kota Depok. Besaran koefisien determinasi (R^2) mencapai 96,3%.
2. Siti Rochimah, Kharis Raharjo, dan Abrar Oemar meneliti Pengaruh Pajak Hotel dan Restoran, Retribusi Daerah, dan Pajak Daerah terhadap PAD pada Kabupaten/Kota Propinsi Jawa Tengah Tahun 2007-2012. Hasilnya: (1) tiada pengaruh signifikan Pajak Hotel dan Restoran terhadap PAD, (2) ada pengaruh signifikan Retribusi Daerah terhadap PAD, dan (3) ada pengaruh signifikan antara Pajak Daerah terhadap PAD.
3. Desak Made Karyani (2012) meneliti Pengaruh Retribusi terhadap PAD Pada Dinas Pendapatan Kabupaten Morowali. Hasilnya: (1) kontribusi parkir terhadap PAD selama 2008-2010 rata-rata 0,039% pertahun; realisasi penerimaan retribusi ini masih amat rendah dan (2) kontribusi retribusi pasar terhadap PAD selama 2008-2010 rata-rata 2,11% pertahun.
4. Mawar Dwi Putrany (2008) meneliti Pengaruh Penerimaan Pajak Reklame dan Pajak Restoran terhadap PAD Pada Suku Dispenda Kodya Jakarta Barat II). Hasil menunjukkan pajak reklame tidak berpengaruh terhadap PAD dan pajak restoran tidak berpengaruh terhadap PAD. Secara simultan pajak reklame dan pajak restoran tidak berpengaruh terhadap PAD.

5. Faizah Wachdin (2010) meneliti Pengaruh Pajak Reklame dan Pajak Hiburan terhadap PAD Kota Surabaya, Studi Pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya. Hasilnya, pajak reklame dan pajak hiburan tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD.

C. Hipotesis Penelitian

Peneliti merumuskan enam hipotesis penelitian, yaitu:

- H1 : Pajak reklame, pajak restoran, retribusi jasa umum, jumlah penduduk, dan jumlah industri berpengaruh terhadap PAD Kabupaten Sleman.
- H2 : Pajak reklame berpengaruh terhadap PAD Kabupaten Sleman.
- H3 : Pajak restoran berpengaruh terhadap PAD Kabupaten Sleman.
- H4 : Retribusi jasa umum berpengaruh terhadap PAD Kabupaten Sleman.
- H5 : Jumlah penduduk berpengaruh terhadap PAD Kabupaten Sleman.
- H6 : Jumlah industri berpengaruh terhadap PAD Kabupaten Sleman.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Riset ini bersifat kausalitas. Riset kausalitas bertujuan menemukan ada tidaknya pengaruh. Bila ada, berapa besar pengaruh (variabel X) dalam menjelaskan perubahan pada variabel Y dan apakah pengaruhnya signifikan. Jenis riset ini ialah riset kuantitatif. Semua data berujud angka. Analisis menggunakan analisis statistik, dengan bantuan perangkat komputer.

B. Variabel-variabel Penelitian

Variabel penelitian ialah obyek riset atau apa yang menjadi perhatian riset (Arikunto, 1993: 91). Jadi, variabel penelitian ialah pokok permasalahan yang diteliti. Pokok permasalahan berupa faktor-faktor yang mempengaruhi atau dipengaruhi. Dalam riset ini terdapat dua kelompok variabel yaitu:

1. Variabel Dependen (Variabel terpengaruh)

Variabel dependen ialah variabel yang tergantung pada atau dipengaruhi variabel lain. Variabel dependen dalam riset ini ialah PAD Sleman.

2. Variabel independen (Variabel yang mempengaruhi)

Variabel independen adalah variabel yang bertindak sebagai penyebab atau yang mempengaruhi variabel lain. Dalam riset ini, variabel bebas terdiri dari pajak reklame (X1), pajak restoran (X2), retribusi jasa umum (X3), jumlah penduduk (X4), dan jumlah industri (X5).

C. Jenis dan Sumber Data

Data yang dibutuhkan dalam skripsi ini adalah data sekunder. Data sekunder ialah data dari pihak lain atau data yang sudah diolah pihak ketiga, secara berkala (*time series*) untuk melihat perkembangan objek riset selama periode tertentu. Ketersediaan data mutlak harus dipenuhi dalam riset ilmiah. Jenis data harus disesuaikan dengan kebutuhan dalam suatu riset. Penelitian ini bersifat studi kasus dengan lokasi penelitian di wilayah Sleman. Data sekunder yang dibutuhkan berkisar pada rentang tahun 2011 hingga 2015.

Data yang dibutuhkan meliputi: (1) PAD Sleman, (2) Pajak reklame Sleman, (3) Pajak restoran Sleman, (4) Retribusi jasa umum Sleman, (5) Jumlah penduduk Sleman, (6) Jumlah industri Sleman. Data sekunder yang digunakan dalam riset ini diperoleh dari sejumlah sumber yang berwenang, yaitu publikasi instansi atau dinas pemerintah, seperti: (1) Biro Pusat Statistik, (2) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Sleman, (3) Dinas Pendapatan Daerah Sleman, (4) Dinas Perindustrian Sleman dan (5) Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Sleman.

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Menurut Arikunto(1996: 115), populasi adalah subyek penelitian. Bagi Hadi (1990: 70), populasi ialah semua individu untuk siapa realita-realita yang diperoleh dari sampel akan digeneralisasikan. Bagi Kerlinger (1979: 9), populasi adalah “*set of all the object of elements under*

consideration” (sekumpulan obyek elemen yang tengah ditinjau). Populasi riset ialah semua data di BPS, Disdukcapil Sleman, Diskoperindag Sleman, dan DPKAD Sleman yang bersifat *time-series*.

2. Sampel

Sampel menurut Kerlinger (1979: 9) adalah “*a portion of a population usually taken as representative of the population*” (porsi dari suatu populasi yang diambil sebagai perwakilan populasi). Menurut Hadi (1989: 221), sampel adalah sebagian dari populasi. Sejumlah penduduk yang jumlahnya kurang dari populasi dan paling sedikit harus mempunyai satu sifat yang sama, sifat kodrat maupun sifat pengkhususan. Menurut Arikunto sampel ialah sebagian atau wakil dari populasi yang akan diteliti.

Jadi sampel merupakan bagian dari populasi. Umumnya, sampel dapat digunakan untuk mewakili karakteristik populasinya. Pengambilan sampel menggunakan teknik *purposive sampling*. Alasannya, dari data tahun 2011-2015, khususnya menyangkut pajak reklame, pajak restoran, retribusi jasa umum, jumlah penduduk, jumlah industri, dan PAD, peneliti yakin mendapatkan data riset yang dibutuhkan.

E. Teknik Pengumpulan Data

Seluruh data variabel bebas (X_1 , X_2 , X_3 , X_4 , dan X_5) dan variabel terikat (Y) dikumpulkan dari data *time-series* dinas-dinas terkait Kabupaten Sleman dari 2011-2015.

F. Teknik Analisis Data

1. Alat Analisis

Untuk mengetahui besaran pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat, model regresi linier berganda memakai program SPSS versi 16.0 digunakan. Piranti ini punya sifat ideal dan bisa diandalkan, secara teknis amat kuat, mudah dikalkulasi dan disimpulkan interpretasinya (Gujarati, 1999).

2. Uji Prasyarat Analisis

Sebelum dianalisis, data riset harus memenuhi persyaratan uji untuk analisis regresi ganda yaitu: uji normalitas, uji autokorelasi, uji multikolinieritas dan uji heterokedastisitas. Ini lantaran terdapat beberapa asumsi dasar yang bisa menghasilkan estimator linier tidak bias dalam penerapan regresi. Bila asumsi-asumsi dasar terpenuhi, hasil riset dapat lebih akurat dan mendekati atau sama dengan kenyataan. Asumsi-asumsi dasar itu dikenal sebagai asumsi klasik, yakni: (a) distribusi kesalahan adalah normal, (b) non autokorelasi, berarti tidak ada pengaruh dari variabel dalam modelnya melalui selang waktu atau tidak terjadi korelasi di antara galat randomnya, (c) homoskedastisitas, berarti varian dari variabel bebas adalah sama atau konstan untuk setiap nilai tertentu dari variabel bebas lain atau variansi residu sama untuk semua pengamatan, (d) non multikolinearitas, berarti antara variabel bebas yang satu dengan

yang lain dalam model regresi tidak terjadi hubungan yang mendekati sempurna ataupun hubungan yang sempurna.

a. Uji Normalitas

Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal atau tidak. Uji t dan uji F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Apabila asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak berlaku (Ghozali, 2005).

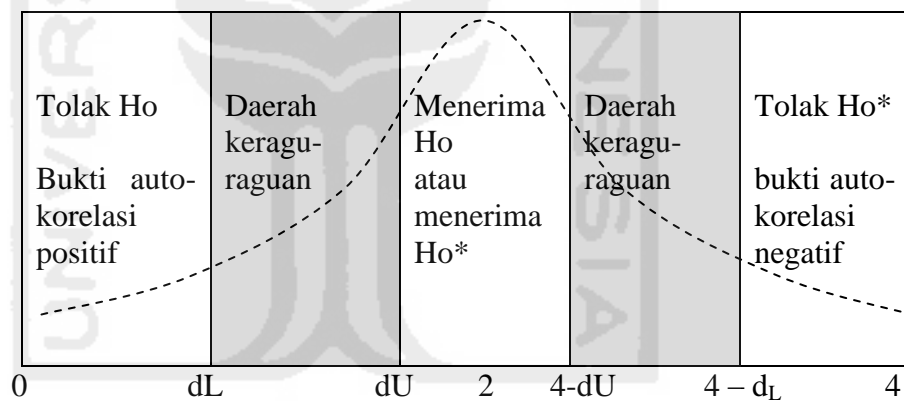
Metode untuk mengetahui kenormalan distribusi residual ialah dengan memperlihatkan penyebaran data pada *normal P-P Plot of regression standardized residual* variabel bebas, di mana jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. Bila data menyebar jauh dari garis diagonal dan/atau tidak mengikuti arah garis diagonal maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

b. Uji Autokorelasi (korelasi serial)

Autokorelasi ialah korelasi antara anggota-anggota serangkaian observasi yang diuraikan menurut waktu dan ruang (Gujarati, 1997: 201). Konsekuensi adanya autokorelasi meliputi selang keyakinan menjadi lebar dan variasi dan *standard error* terlalu rendah. Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya). Jika terjadi

korelasi, maka disebut problem korelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lain. Masalah muncul karena kesalahan pengganggu tidak bebas dari satu observasi ke observasi berikutnya (Ghozali, 2005: 95). Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi.

Untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi dalam persamaan regresi, dipakai Uji Durbin-Watson (statistik d). Kriteria pengambilan keputusan ialah dengan membandingkan statistik d dengan d tabel dalam tabel DW pada tingkat kepercayaan 5%. Daerah penerimaan dan penolakan hipotesa uji Durbin Watson disajikan di bawah:



Gambar 3.1 Statistik d Durbin-Watson

Mekanisme penerimaan atau penolakan hipotesa adalah:

1. Jika H_0 adalah tidak ada serial korelasi positif.

$d < d_L$: menolak H_0

$d > d_U$: tidak menolak H_0 .

$d_L \leq d \leq d_U$: pengujian tidak meyakinkan

2. Jika H_0 (H_0^*) tidak ada serial korelasi negatif:

$d > 4 - d_L$: menolak H_0

$d < 4 - dU$: tidak menolak H_0 .

$4 - dU \leq d \leq 4 - dL$: pengujian tidak meyakinkan

3. Jika H_0 ialah tak ada serial korelasi baik positif maupun negatif.

$d < dL$: menolak H_0

$d > 4 - dL$: menolak H_0

$dU < d < 4 - dU$: tidak menolak H_0 .

$dL \leq d \leq dU$: pengujian tidak meyakinkan

$-dU \leq d \leq 4 - dL$: pengujian tidak meyakinkan

c. Uji Multikolinieritas

Multikolinearitas berarti ada hubungan linier yang sempurna atau pasti di antara beberapa atau semua variabel yang menjelaskan dari model regresi (Gujarati, 1997: 157). Model regresi yang baik menekankan agar tidak terjadi korelasi antarvariabel bebas. Jika sesama variabel bebas saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini dikatakan tak ortogonal (Ghozali, 2005: 91). Variabel ortogonal ialah variabel bebas yang nilai korelasi antarsesama variabel bebas = 0.

Untuk mengetahui ada tidaknya multikolinieritas antar-ubahan bebas, dilakukan perhitungan interkorelasi dengan program SPSS 16.00. Pengujian multikolinieritas dilakukan dengan memperhatikan nilai tolerance dan nilai VIF. Kriteria pengambilan keputusan ialah jika nilai tolerance mendekati 1 atau besarnya nilai VIF berkisar di antara 1-10, maka H_0 diterima dan H_a ditolak.

d. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain (Ghozali, 2001). Heteroskedastisitas yaitu variabel pengganggu (e) memiliki varian yang berbeda dari satu observasi ke observasi lain atau varian antarvariabel bebas tak sama. Ini melanggar asumsi heteroskedastisitas yaitu setiap variabel penjelas memiliki varians yang sama (konstan). Heteroskedastisitas lebih kerap muncul pada data *cross section* dibandingkan data *time series* (Kuncoro, 2001). Untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas, digunakan korelasi teknik Glejser. Pendeteksian gejala heterokedastisitas dengan melakukan regresi antara variabel bebas dengan ABSE-nya. Kriteria pengambilan keputusan adalah jika besarnya koefisien setiap variabel bebas dengan nilai residualnya tak signifikan pada taraf kepercayaan 5% atau nilai p -value (probabilitas) $> 0,05$, maka tidak terjadi heterokedastisitas pada variabel bebas tersebut.

3. Analisis Regresi Linier Berganda

Bentuk umum model analisis regresi linier berganda digunakan sebagai alat analisis. Analisis regresi linier berganda merupakan teknik analisis yang mencoba menjelaskan ketergantungan variabel terikat. Untuk meramalkan nilai rata-rata tambahan berdasarkan nilai tetap variabel bebas (Gujarati, 1988: 146). Model regresi linear berganda yang

digunakan sebagai alat analisis adalah menggunakan persamaan regresi berganda, yang dijelaskan berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + b_5X_5 + e$$

Dimana:

Y = Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sleman

X₁ = Pajak Reklame

X₂ = Pajak Restoran

X₃ = Retribusi Jasa Umum

X₄ = Jumlah Penduduk

X₅ = Jumlah Industri

e = kesalahan pengganggu

a = konstanta

4. Uji Koefisien Determinasi (R²)

Koefisien determinasi merupakan proses variabel terikat yang diterangkan pengaruh linier dari variabel bebas. Perlu diketahui bahwa (R²) ialah sebuah fungsi yang tidak pernah menurun dari jumlah variabel bebas yang terdapat dalam model regresi dengan bertambahnya jumlah variabel bebas, maka R² selalu meningkat dan tidak pernah menurun dengan kata lain penambahan variabel bebas tidak akan menurunkan R². R² bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh variasi variabel bebas dapat menerangkan dengan baik variasi variabel terikat. Untuk mengukur kebaikan suatu model (*goodness of fit*) koefisien determinasi bisa

digunakan. Koefisien determinasi merupakan angka yang memberikan proporsi atau persentasi variasi total dalam variabel terikat yang dijelaskan oleh variabel bebas (Gujarati, 2003).

Nilai R^2 yang sempurna adalah satu, yaitu bila keseluruhan variasi dependen bisa dijelaskan variabel bebas yang dimasukkan dalam model. Di mana $0 < R^2 < 1$ sehingga kesimpulan yang bisa diambil ialah: (a) nilai R^2 yang kecil atau mendekati nol berarti kemampuan variabel-variabel bebas dalam menjelaskan variasi variabel terikat sangat terbatas dan (b) nilai R^2 mendekati satu berarti kemampuan variabel-variabel bebas dalam menjelaskan hampir semua informasi yang digunakan untuk memprediksi variasi variabel terikat. Rumus uji Determinasi ialah:

$$R^2 = \frac{\sum \beta_i XY}{\sum Y_i^2}$$

R^2 = Koefisien determinasi

β_i = Koefisien regresi

X = Variabel bebas

Y = Variabel terikat

Sedangkan nilai R dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$R = \sqrt{R^2}$$

a. Pengujian Hipotesa Serentak (Uji F)

Uji F untuk membuktikan secara statistik seluruh variabel bebas berpengaruh secara serentak terhadap variabel terikat. Jadi, Uji

F dilakukan untuk menguji apakah pengaruh variabel bebas secara serentak terhadap variabel terikat signifikan atau tidak. Hipotesa:

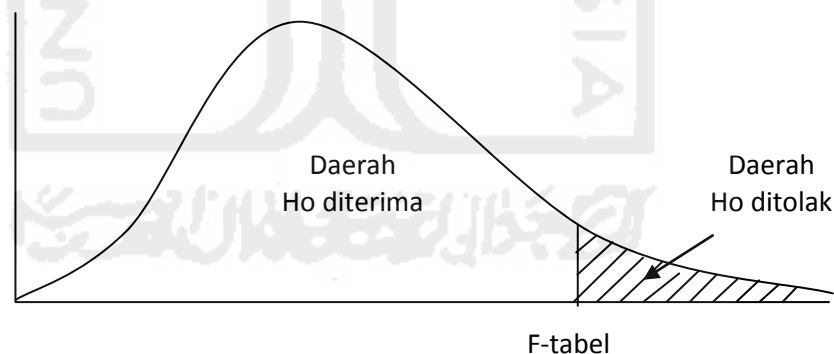
$H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = 0$, tidak ada pengaruh pajak reklame, pajak restoran, retribusi jasa umum, jumlah penduduk, dan jumlah industri terhadap PAD Kabupaten Sleman.

$H_a : \beta_1 \neq \beta_2 \neq \beta_3 \neq 0$, ada pengaruh pajak reklame, pajak restoran, retribusi jasa umum, jumlah penduduk, dan jumlah industri terhadap PAD Kabupaten Sleman.

Kriteria pengambilan keputusan:

- Jika $F\text{-hitung} < F\text{-tabel}$; H_0 diterima dan H_a ditolak
- Jika $F\text{-hitung} > F\text{-tabel}$; H_0 ditolak dan H_a diterima.

Secara visual daerah penerimaan dan penolakan hipotesa untuk uji serentak disajikan pada gambar 4 berikut:



Gambar 3.2 Daerah Penerimaan dan Penolakan Hipotesa Uji Serentak

b. Uji t-statistik

Uji statistik t dilakukan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas atau bebas secara individual dalam menerangkan variasi F tabel dengan F hitung variabel bebas (Ghozali,

2005). Untuk menguji pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat secara individu, disusun hipotesis berikut:

1. $H_0 : \beta_1 \leq 0$, pajak reklame tidak berpengaruh terhadap PAD Kabupaten Sleman
 $H_1 : \beta_1 > 0$, pajak reklame berpengaruh terhadap PAD Kabupaten Sleman
2. $H_0 : \beta_2 \leq 0$, pajak restoran tidak berpengaruh terhadap PAD Kabupaten Sleman
 $H_1 : \beta_2 > 0$, pajak restoran berpengaruh terhadap PAD Kabupaten Sleman
3. $H_0 : \beta_3 \leq 0$, retribusi jasa umum tidak berpengaruh terhadap PAD Kabupaten Sleman
 $H_1 : \beta_3 > 0$, retribusi jasa umum berpengaruh terhadap PAD Kabupaten Sleman
4. $H_0 : \beta_4 \leq 0$, jumlah penduduk tidak berpengaruh terhadap PAD Kabupaten Sleman
 $H_1 : \beta_4 > 0$, jumlah penduduk berpengaruh terhadap PAD Kabupaten Sleman
5. $H_0 : \beta_5 \leq 0$, jumlah industri tidak berpengaruh terhadap PAD Kabupaten Sleman
 $H_1 : \beta_5 > 0$, jumlah 40industri berpengaruh terhadap PAD Kabupaten Sleman

Untuk menguji hipotesis digunakan program SPSS 16.0 dengan membandingkan t hitung dan t tabel. Bila t hitung > t tabel, hipotesis alternatif diterima. Sebaliknya, jika t hitung < t tabel, variabel bebas tak mempengaruhi variabel terikat. Bisa pula dengan taraf signifikansi pada uji t. Jika nilai signifikan lebih kecil dari 0,05, maka H₀ ditolak. Jika nilai signifikan lebih besar dari 0,05 maka H₀ diterima. Pengujian hipotesis bisa dituliskan dalam bentuk berikut:

H₀ : $\beta_i \leq 0$ (tidak ada pengaruh positif antara variabel pajak reklame, pajak restoran, retribusi jasa umum, jumlah penduduk, dan jumlah industri secara parsial terhadap variabel PAD Kabupaten Sleman).

H_a : $\beta_i > 0$ (ada pengaruh positif antara variabel pajak reklame, pajak restoran, retribusi jasa umum, jumlah penduduk, dan jumlah industri secara parsial terhadap variabel PAD Kabupaten Sleman).

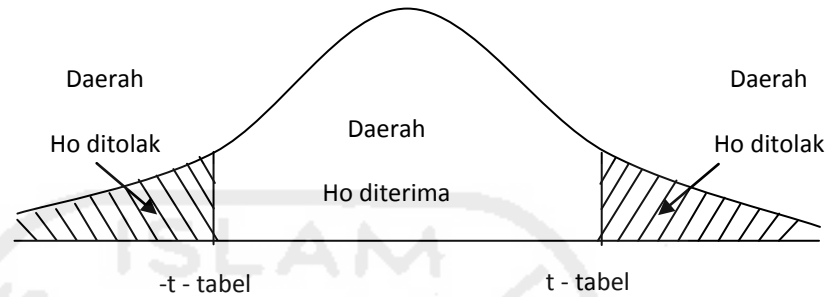
Dimana β_i adalah koefisien regresi variabel independen ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, dan ke-5.

Apabila t-hitung > +t-tabel, H₀ ditolak pada tingkat kepercayaan 5%, berarti bahwa variabel independen yang diuji nyata mempengaruhi variabel dependen. Jika t-hitung < +t-tabel, H₀ diterima, berarti nilai β tidak signifikan, dapat dikatakan variabel independen yang diuji tidak mempengaruhi secara nyata terhadap variabel dependen.

Prosedur pengujian:

(a) Pengujian Hipotesis 1

Dengan selang keyakinan $\alpha = 5\%$, untuk mengetahui t-tabel dapat digambarkan daerah penerimaan H_0 dan penolakan H_0 berikut.



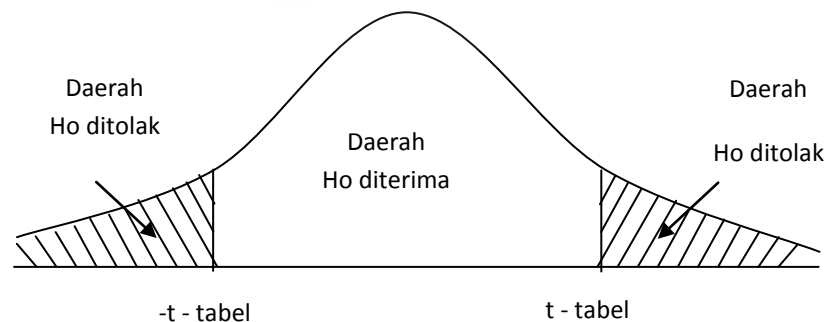
Gambar 3.3 Daerah Penerimaan dan Penolakan Hipotesa Var. Pajak reklame

Keputusan menerima atau menolak H_0 dengan membandingkan hasil t-hitung dengan t-tabel dengan kriteria sebagai berikut:

- Jika $-t\text{-tabel} < t\text{-hitung} < +t\text{-tabel}$: menerima H_0 dan menolak H_a , tidak ada pengaruh pajak reklame terhadap PAD.
- Jika $-t\text{-tabel} > t\text{-hitung} > +t\text{-tabel}$: menolak H_0 dan menerima H_a , berarti ada pengaruh pajak reklame terhadap PAD.

(b) Pengujian Hipotesis 2

Dengan selang keyakinan $\alpha = 5\%$ untuk mengetahui t-tabel dapat digambarkan daerah penerimaan H_0 dan penolakan H_0 berikut:



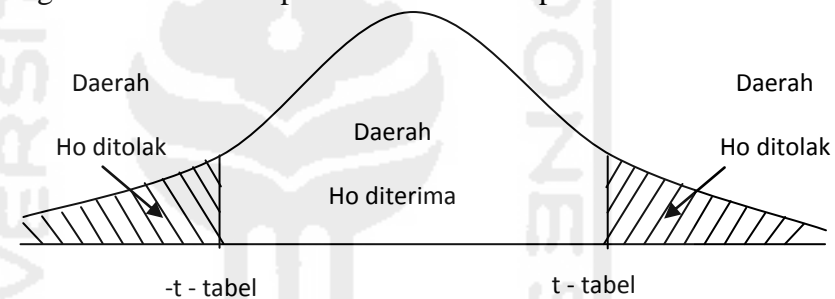
Gambar 3.4 Daerah Penerimaan dan Penolakan Hipotesa Var. Pajak restoran

Keputusan menerima atau menolak H_0 dengan membandingkan hasil t-hitung dengan t-tabel sebagai berikut:

- Jika $-t\text{-tabel} < t\text{-hitung} < +t\text{-tabel}$: menerima H_0 dan menolak H_a , tidak ada pengaruh pajak restoran terhadap PAD.
- Jika $-t\text{-tabel} > t\text{-hitung} > +t\text{-tabel}$: menolak H_0 dan menerima H_a , ada pengaruh pajak restoran terhadap PAD.

(c) Pengujian Hipotesis 3

Dengan selang keyakinan $\alpha = 5\%$, untuk mengetahui t-tabel dapat digambarkan daerah penerimaan H_0 dan penolakan H_0 berikut :



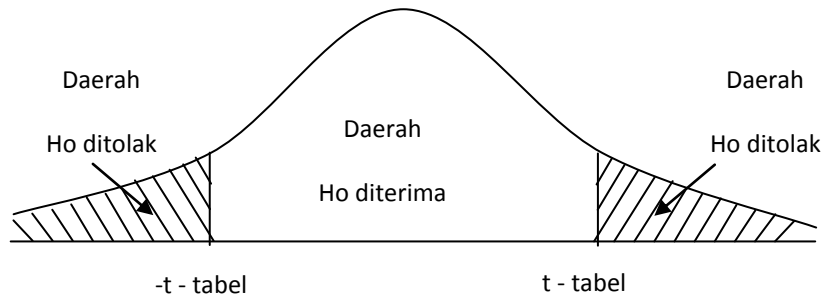
Gambar 3.5 Daerah Penerimaan dan Penolakan Hipotesa Var. Retribusi jasa umum

Keputusan menerima atau menolak H_0 dengan membandingkan hasil t-hitung dengan t-tabel dengan kriteria sebagai berikut:

- Jika $-t\text{-tabel} < t\text{-hitung} < +t\text{-tabel}$: menerima H_0 dan menolak H_a , tidak ada pengaruh retribusi jasa umum terhadap PAD.
- Jika $-t\text{-tabel} > t\text{-hitung} > +t\text{-tabel}$: menolak H_0 dan menerima H_a , ada pengaruh retribusi jasa umum terhadap PAD.

(d) Pengujian Hipotesis 4

Dengan selang keyakinan $\alpha = 5\%$ untuk mengetahui t-tabel dapat digambarkan daerah penerimaan H_0 dan penolakan H_0 berikut :



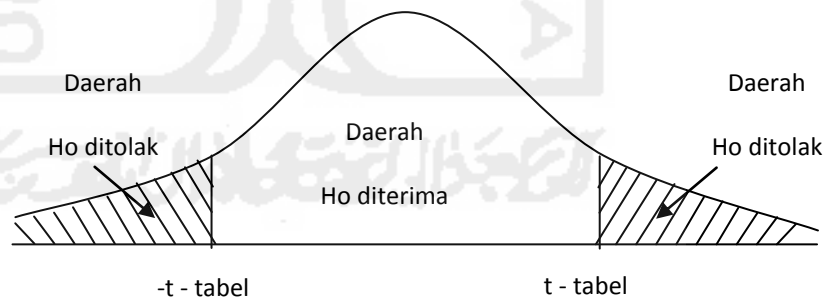
Gambar 3.6 Daerah Penerimaan dan Penolakan Hipotesa Var. Jumlah penduduk

Keputusan menerima atau menolak H_0 dengan membandingkan hasil t -hitung dengan t -tabel dengan kriteria sebagai berikut:

- Jika $-t\text{-tabel} < t\text{-hitung} < +t\text{-tabel}$: menerima H_0 dan menolak H_a , tidak ada pengaruh jumlah penduduk terhadap PAD.
- Jika $-t\text{-tabel} > t\text{-hitung} > +t\text{-tabel}$: menolak H_0 dan menerima H_a , ada pengaruh jumlah penduduk terhadap PAD.

(e) Pengujian Hipotesis 5

Dengan selang keyakinan $\alpha = 5\%$, dapat digambarkan daerah penerimaan H_0 dan penolakan H_0 sebagai berikut :



Gambar 3.7 Daerah Penerimaan dan Penolakan Hipotesa Var. Jumlah industri

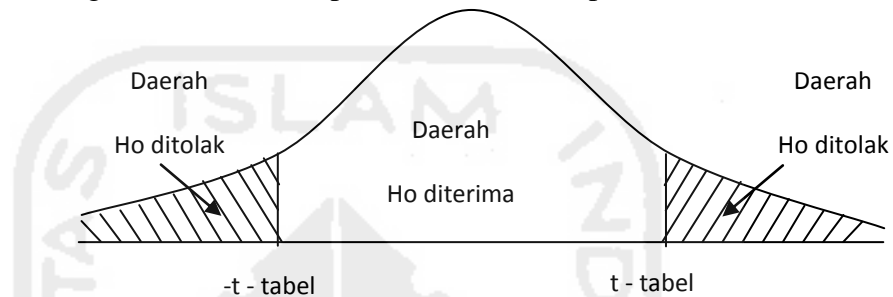
Keputusan menerima atau menolak H_0 dengan membandingkan hasil t -hitung dengan t -tabel dengan kriteria sebagai berikut:

- Jika $-t\text{-tabel} < t\text{-hitung} < +t\text{-tabel}$: menerima H_0 dan menolak H_a , tidak ada pengaruh jumlah industri terhadap PAD.

- Jika $-t\text{-tabel} > t\text{-hitung} > +t\text{-tabel}$: menolak H_0 dan menerima H_a , ada pengaruh jumlah industri terhadap PAD.

(f) Pengujian Hipotesis 6

Dengan selang keyakinan $\alpha = 5\%$ untuk mengetahui t-tabel dapat digambarkan daerah penerimaan H_0 dan penolakan H_0 berikut :



Gambar 3.8 Daerah Penerimaan dan Penolakan Hipotesa Variabel Pajak reklame, Pajak restoran, Retribusi jasa umum, Jumlah penduduk, Jumlah industri, dan PAD

Keputusan menerima atau menolak H_0 dengan membandingkan hasil t-hitung dengan t-tabel dengan kriteria sebagai berikut:

- Jika $-t\text{-tabel} < t\text{-hitung} < +t\text{-tabel}$: menerima H_0 dan menolak H_a , berarti tidak ada pengaruh Pajak reklame, pajak restoran, retribusi jasa umum, jumlah penduduk, dan jumlah industri secara serentak terhadap PAD.
- Jika $-t\text{-tabel} > t\text{-hitung} > +t\text{-tabel}$: menolak H_0 dan menerima H_a , berarti ada pengaruh Pajak reklame, pajak restoran, retribusi jasa umum, jumlah penduduk, dan jumlah industri secara serentak terhadap PAD.

BAB 4

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. HASIL PENELITIAN

Sebelum memaparkan temuan dan hasil penelitian, peneliti perlu menegaskan beberapa poin. Pertama, data riset diperoleh dari sejumlah instansi terkait di wilayah Sleman. Kedua, baik data kependudukan maupun data industri, tersedia dalam laporan tahunan, bukan bulanan. Padahal, untuk keperluan pengolahan data, peneliti membutuhkan data bulanan. Peneliti sudah berusaha mencari data ke BPS Sleman. Namun, data kependudukan tidak tersedia. Peneliti berusaha mengatasi persoalan ini dengan melacak data kependudukan bulanan, termasuk catatan mengenai kelahiran dan kematian untuk seluruh Sleman. Ini cukup memakan waktu. Juga data industri. Peneliti harus melacak ke tahap perizinan demi mendapatkan data bulanan.

Untuk data pajak bulanan, peneliti juga sempat mendapatkan kendala di lapangan. Kantor DPKAD dan Dispenda Sleman kerap pindah. Perpindahan berdampak pada pemeliharaan arsip laporan. Sesudah terbentur masalah yang memakan waktu cukup lama, peneliti berhasil mendapatkan akses ke petugas yang berwenang mengurus data laporan pajak, terutama *softcopy*-nya. Data bulanan inilah yang nantinya diolah.

Data laporan pajak Pemda Sleman sudah dikelompokkan menurut sejumlah pos besar, seperti pajak reklame, pajak restoran, retribusi daerah, hingga PAD. Namun, khusus untuk pos retribusi daerah, belum ada pemilahan

lebih rinci dan terpadu. Maksudnya, pos penerimaan retribusi daerah terdiri dari dua bagian, yakni retribusi jasa umum dan retribusi jasa khusus. Dalam laporan bulanannya, DPKAD dan/atau Dispenda belum menyusun pos-pos khusus bagi kedua jenis retribusi ini. Saat hendak mengolah data, peneliti harus menghitung secara manual, jenis-jenis penerimaan mana saja yang termasuk ke dalam retribusi jasa umum. Ini cukup menyita waktu. Selain harus saksama dan teliti, peneliti juga mesti cermat agar tidak keliru.

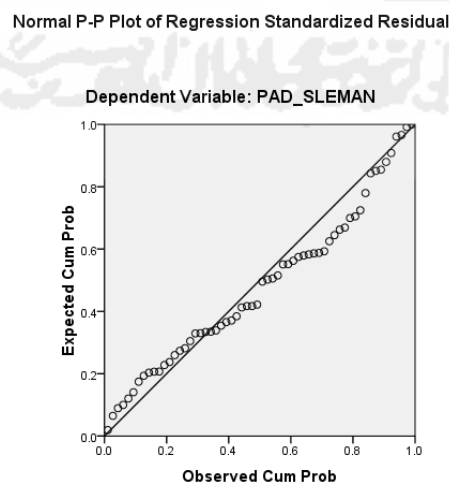
Sesudah seluruh persoalan di lapangan teratasi, peneliti melakukan tabulasi data. Lalu, pengolahan data dilakukan. Berikut ini adalah laporannya.

1. Uji Prasyarat Analisis

a. Uji Normalitas

Syarat pertama dalam analisis parametrik ialah distribusi data harus normal. Hasil pengujian *Normal Probability* dapat dilihat pada output regresi atau disajikan sebagai berikut:

Gambar 4.1. Grafik Pengujian Normalitas



Sumber: Data penelitian, 2017, diolah

Kriteria pengambilan keputusan ialah sebagai berikut:

- Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.
- Jika data menyebar jauh dari garis diagonal atau tidak mengikuti arah diagonal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

Dari gambar di atas tampak data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka data terdistribusi dengan normal dan **model regresi telah memenuhi asumsi normalitas..**

b. Uji Multikolinearitas

Model regresi yang baik mensyaratkan tiadanya masalah multikolinearitas. Dampak dari adanya multikolinearitas meliputi: (a) nilai *standard error* untuk masing-masing koefisien menjadi tinggi, sehingga *t* hitung menjadi rendah, (b) *standard error of estimate* akan semakin tinggi dengan bertambahnya variabel bebas dan (c) pengaruh masing-masing variabel bebas sulit dideteksi. Untuk mendeteksi multikolinearitas dengan melihat nilai Tolerance dan VIF. Semakin kecil nilai Tolerance dan semakin besar nilai VIF maka semakin mendekati terjadinya masalah multikolinearitas. Dalam kebanyakan riset, ditegaskan jika Tolerance lebih dari 0,1 dan VIF kurang dari 10 maka tidak terjadi multikolinearitas. Lihat tabel di bawah ini.

Tabel 4.1. Pengujian Multikolinearitas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	-4.115E11	1.442E11		-2.854	.006		
PJK_REKLAME	6.398	3.240	.115	1.975	.053	.885	1.130
PJK_RESTORAN	-.075	3.371	-.004	-.022	.982	.102	9.777
RET_JASAUMUM	1.597	.385	.416	4.148	.000	.298	3.360
JML_PDK	212389.44	142158.38	.332	1.494	.141	.061	16.495
JML_INDSTRI	1.194E7	1.260E7	.204	.948	.347	.065	15.391

a. Dependent Variable: PAD_SLEMAN

Sumber: Data penelitian diolah, 2017

Dari tabel di atas terlihat bahwa nilai Tolerance dari variabel bebas Pajak Reklame, Pajak Restoran dan Retribusi Jasa Umum lebih besar dari 0,1 dan nilai VIF kurang dari 10. Dapat disimpulkan untuk **ketiga variabel bebas ini tidak terjadi masalah multikolinearitas.**

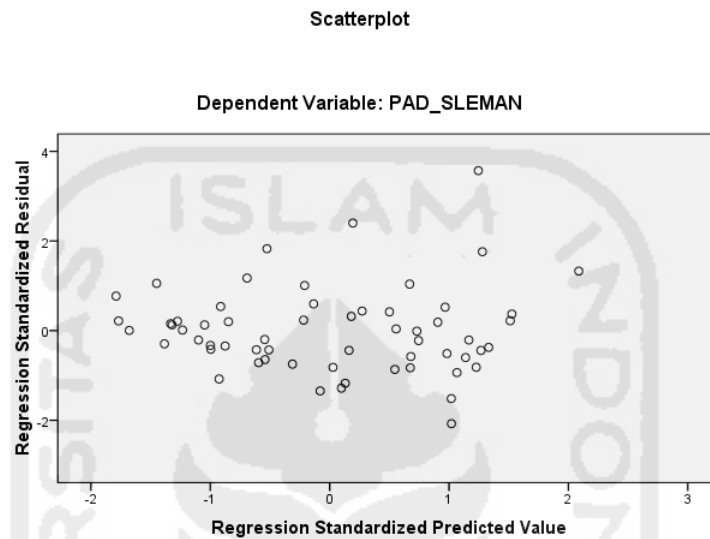
Namun, variabel bebas Jumlah Penduduk (X4) dan Jumlah Industri (X5), nilai Tolerance kurang dari 0,1 dan VIF lebih besar dari 10. Jadi, untuk **kedua variabel bebas ini terjadi masalah multikolinearitas.**

c. Uji Heteroskedastisitas

Model regresi yang baik mensyaratkan tiadanya masalah heteroskedastisitas. Heteroskedastisitas menyebabkan penaksir atau estimator menjadi tidak efisien dan nilai koefisien determinasi menjadi sangat tinggi. Untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas kita dapat melihat pada pola titik-titik pada scatterplots regresi. Jika titik-titik menyebar dengan pola yang tidak jelas di atas dan di bawah angka 0

pada sumbu Y, tidak terjadi masalah heteroskedastisitas. *Scatterplots* dapat dilihat pada output regresi dan disajikan sebagai berikut:

Gambar 4.2. Grafik Pengujian Heteroskedastisitas



Sumber: Data penelitian 2017, diolah

Dari *scatterplot* di atas dapat diketahui bahwa titik-titik menyebar dengan pola yang tidak jelas di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. **Model regresi tidak terjadi masalah heterokedastisitas.**

d. Uji Autokorelasi

Model regresi yang baik mensyaratkan tidak ada masalah autokorelasi. Dampak yang diakibatkan dari adanya autokorelasi ialah varian sampel tidak dapat menggambarkan varian populasinya. Lihat tabel 4.2 di bawah ini untuk memeriksa ada tidaknya autokorelasi.

Tabel 4.2. Pengujian Autokorelasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics					Durbin-Watson
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change	
1	.915 ^a	.838	.823	6.774E9	.838	55.923	5	54	.000	1.988

a. Predictors: (Constant), JML_INDSTRI, PJK_REKLAME, RET_JASAUMUM, PJK_RESTORAN, JML_PDK

b. Dependent Variable: PAD_SLEMAN

Sumber: Data Penelitian 2017, diolah

Untuk mendeteksi ada tidaknya autokorelasi kita bisa melakukan uji Durbin-Watson dengan prosedur berikut ini:

- 1) Menentukan hipotesis nol dan hipotesis alternatif

H_0 : Tidak terjadi autokorelasi

H_a : Terjadi autokorelasi

- 2) Menentukan taraf kepercayaan, yaitu 0,05.
- 3) Menentukan nilai d (Durbin-Watson)

Nilai d dapat dilihat dari hasil regresi yaitu sebesar 1,988.

- 4) Menentukan nilai dL dan dU

Nilai dL dan dU terlihat di tabel Durbin-Watson pada signifikansi 0,05, $n = 60$ dan $k = 5$ (n adalah jumlah data dan k adalah jumlah variabel bebas). Diperoleh angka $dL = 1,4083$ dan $dU = 1,7671$.

Jadi dapat dihitung nilai $6-dU = 4,2329$ dan $6-dL = 4,5917$.

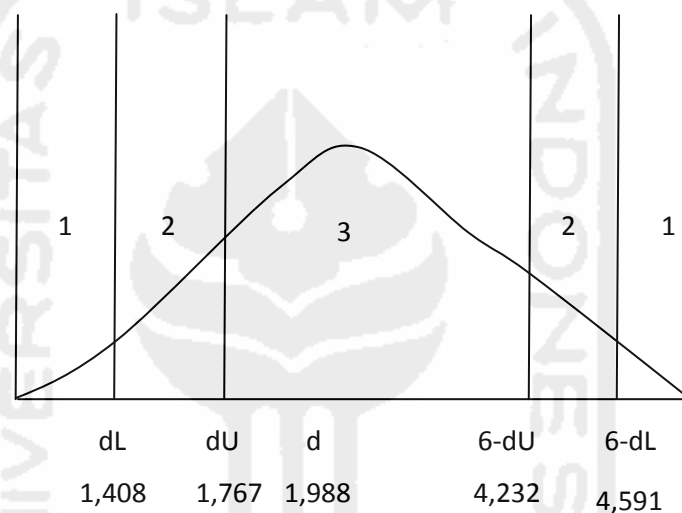
- 5) Pengambilan keputusan

- $dU < d < 6-dU$ maka H_0 diterima (tidak terjadi autokorelasi)
- $d < dL$ atau $d > 6-dL$ maka H_0 ditolak (terjadi autokorelasi)
- $dL < d < dL$ atau $6-dU < d < 6-dL$ maka tidak ada kesimpulan

6) Kesimpulan

Dapat diketahui bahwa nilai d (Durbin-Watson) sebesar 1,988 terletak pada daerah $dU < d < 6-dU$ ($1,7671 < 1,988 < 4,2329$) maka H_0 diterima. Kesimpulannya **tidak terjadi autokorelasi pada model regresi.**

7) Gambar 4.3 Daerah Uji Autokorelasi



Sumber: Data penelitian diolah, 2017

Keterangan:

1. Daerah H_0 ditolak (ada autokorelasi)
2. Daerah tidak ada kesimpulan
3. Daerah H_0 diterima (tidak ada autokorelasi)

2. Koefisien Regresi

Dengan menggunakan software SPSS versi 16.0, PAD sebagai variabel terikat dan pajak reklame, pajak restoran, retribusi jasa umum, jumlah penduduk dan jumlah industri sebagai variabel bebas dan menggunakan

data time series dari tahun 2011-2015, maka diperoleh hasil regresi seperti tertera dalam tabel 4.1 berikut:

Tabel 4.3 Koefisien Uji Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	-4.115E11	1.442E11		-2.854	.006		
PJK_REKLAME	6.398	3.240	.115	1.975	.053	.885	1.130
PJK_RESTORAN	-.075	3.371	-.004	-.022	.982	.102	9.777
RET_JASAUMUM	1.597	.385	.416	4.148	.000	.298	3.360
JML_PDK	212389.44	142158.38	.332	1.494	.141	.061	16.495
JML_INDSTRI	1.194E7	1.260E7	.204	.948	.347	.065	15.391

a. Dependent Variable: PAD_SLEMAN

Sumber: Data penelitian diolah, 2017

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + b_5X_5 + e$$

$$Y = -4,115E11 + 6,398X_1 - 0,075X_2 + 1,597X_3 + 212,389,446X_4 + 1,194E7X_5 + e$$

Dari persamaan regresi di atas, dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Konstanta $a = -4,115E11$ (-411.500.000.000)

Artinya, jika nilai Pajak Reklame, Pajak Restoran, Retribusi Jasa Umum, Jumlah Penduduk dan Jumlah Industri adalah nol (0), maka PAD Kabupaten Sleman akan bernilai negatif sebesar -4,115E11.

b. Koefisien $b_1 = 6,398$

Artinya, jika variabel Pajak Restoran, Retribusi Jasa Umum, Jumlah Penduduk dan Jumlah Industri nilainya tetap, dan Pajak Reklame ditingkatkan sebesar Rp 1, maka PAD Kabupaten Sleman akan meningkat sebesar Rp 6,398.

c. Koefisien $b_2 = -0,075$ (minus)

Artinya, jika variabel Pajak Reklame, Retribusi Jasa Umum, Jumlah Penduduk dan Jumlah Industri nilainya tetap, dan Pajak Restoran ditingkatkan sebesar Rp 1, maka PAD Sleman akan menurun sebesar Rp 0,075 (minus Rp 0,075).

d. Koefisien $b_3 = 1,597$

Jika variabel Pajak Reklame, Restoran, Jumlah Penduduk dan Jumlah Industri nilainya tetap, dan Retribusi Jasa Umum ditingkatkan sebesar Rp 1, maka PAD Kabupaten Sleman meningkat sebesar Rp 1,597.

e. Koefisien $b_4 = 212.389,446$

Artinya, jika variabel Pajak Reklame, Pajak Restoran, Retribusi Jasa Umum dan Jumlah Industri nilainya tetap, dan Jumlah Penduduk ditingkatkan sebesar 1 jiwa, maka PAD Sleman akan meningkat sebesar Rp 212.389,446.

f. Koefisien $b_5 = 1,194E7$

Jika variabel Pajak Reklame, Pajak Restoran, Retribusi Jasa Umum dan Jumlah Penduduk nilainya tetap, dan Jumlah Industri ditingkatkan sebesar 1 buah, PAD Sleman akan meningkat sebesar Rp 1,194E7.

3. Pengujian Koefisien Regresi Secara Serentak (Uji F)

Uji F atau uji koefisien regresi serentak dimaksudkan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas secara serentak terhadap variabel terikat. Apakah pengaruhnya signifikan atau tidak. Hasil uji F dapat dilihat pada tabel 4.2.

Tabel 4.4 Hasil Uji F (Uji Serentak)

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	1.283E22	5	2.566E21	55.923	.000 ^a
Residual	2.478E21	54	4.589E19		
Total	1.531E22	59			

a. Predictors: (Constant), JML_INDSTRI, PJK_REKLAME, RET_JASAUMUM, PJK_RESTORAN, JML_PDK

b. Dependent Variable: PAD_SLEMAN

Sumber: Data penelitian diolah, 2017

Adapun tahap-tahap pengujiannya ialah sebagai berikut:

a. Menentukan hipotesis nol dan hipotesis alternatif.

$H_0 : b_1 = b_2 = b_3 = b_4 = b_5 = b_6 = 0$; Artinya, Pajak Reklame, Pajak Restoran, Retribusi Jasa Umum, Jumlah Penduduk dan Jumlah Industri secara serentak tidak berpengaruh terhadap PAD Sleman.

$H_a : b_1 \neq b_2 \neq b_3 \neq b_4 \neq b_5 \neq b_6 \neq 0$; Artinya, Pajak Reklame, Pajak Restoran, Retribusi Jasa Umum, Jumlah Penduduk dan Jumlah Industri secara serentak berpengaruh terhadap PAD Sleman.

b. Menentukan taraf signifikansi menggunakan 0,05.

c. F Hitung dan F Kritis

- F Hitung ialah 55,923 (lihat pada tabel 4.4 di atas)

- F Kritis dapat dicari pada tabel statistik pada signifikansi 0,05 $df_1 = k - 1$ (atau $6-1=5$) dan $df_2 = n - k$ (atau $60-6=54$) (k adalah jumlah variabel). Didapat F Kritis ialah 2,39.

d. Pengambilan keputusan

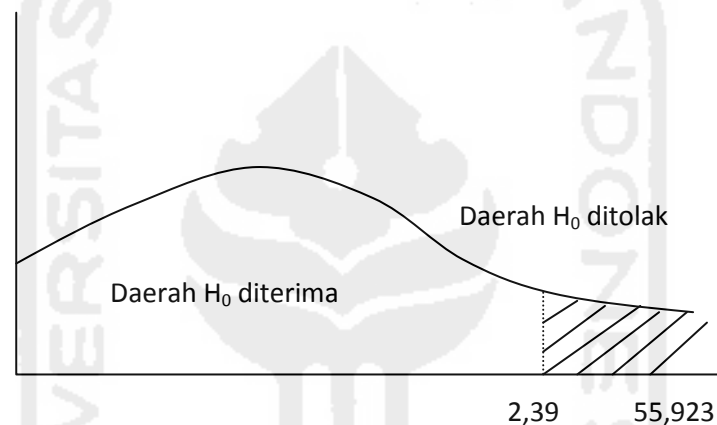
$F \text{ Hitung} \leq F \text{ Kritis}$, H_0 diterima

$F \text{ Hitung} > F \text{ Kritis}$, H_0 ditolak

e. Kesimpulan

Dapat diketahui bahwa F hitung (55,923) > F Tabel (2,39) jadi hipotesis nol ditolak. Kesimpulannya, **Pajak Reklame, Pajak Restoran, Retribusi Jasa Umum, Jumlah Penduduk dan Jumlah Industri berpengaruh secara serentak terhadap Pendapatan Asli Daerah Sleman.**

f. Gambar 4.4 Daerah Penerimaan dan Penolakan Uji F



Sumber: Data penelitian diolah, 2017

Pengambilan Keputusan berdasar Probabilitas (Signifikansi):

1) Menentukan hipotesis nol dan hipotesis alternatif

$$H_0 : b_1 = b_2 = b_3 = b_4 = b_5 = b_6 = 0$$

Artinya, Artinya, Pajak Reklame, Pajak Restoran, Retribusi Jasa Umum, Jumlah Penduduk dan Jumlah Industri secara serentak tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Sleman.

$$H_a : b_1 \neq b_2 \neq b_3 \neq b_4 \neq b_5 \neq b_6 \neq 0$$

Artinya, Pajak Reklame, Pajak Restoran, Retribusi Jasa Umum, Jumlah Penduduk dan Jumlah Industri secara serentak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Sleman.

2) Menentukan probabilitas (signifikansi). Dari tabel 4.4 dapat diketahui probabilitas adalah 0,000.

3) Pengambilan keputusan

Probabilitas $> 0,05$ maka H_0 diterima

Probabilitas $\leq 0,05$ maka H_0 ditolak

4) Kesimpulan

Dapat diketahui bahwa probabilitas sebesar 0,000 lebih kecil daripada 0,05. Maka hipotesis nol ditolak. Kesimpulannya, **Pajak Reklame, Pajak Restoran, Retribusi Jasa Umum, Jumlah Penduduk dan Jumlah Industri secara serentak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Sleman.**

4. Pengujian Koefisien Regresi Secara Individual (Uji t)

Uji t untuk mengetahui pengaruh variabel bebas secara parsial terhadap variabel terikat. Apakah pengaruhnya signifikan atau tidak. Karena ada lima variabel bebas, maka akan terdapat lima pengujian parsial dari setiap variabel bebas terhadap PAD Sleman. Masing-masing pengujian diuraikan di bawah ini. Hasil uji parsial bisa dilihat pada tabel 4.5 di bawah ini.

Tabel 4.5 Hasil Uji Parsial (uji t)

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	-4.115E11	1.442E11		-2.854	.006		
PJK_REKLAME	6.398	3.240	.115	1.975	.053	.885	1.130
PJK_RESTORAN	-.075	3.371	-.004	-.022	.982	.102	9.777
RET_JASAUMUM	1.597	.385	.416	4.148	.000	.298	3.360
JML_PDK	212389.44	142158.38	.332	1.494	.141	.061	16.495
JML_INDSTRI	1.194E7	1.260E7	.204	.948	.347	.065	15.391

a. Dependent Variable: PAD_SLEMAN

Sumber: Data penelitian diolah, 2017

a. Pengujian Pengaruh Pajak Reklame terhadap PAD Sleman

1) Menentukan hipotesis nol dan hipotesis alternatif

$H_0 : b_1 = 0$; Pajak Reklame tak berpengaruh terhadap PAD Sleman

$H_a : b_1 \neq 0$; Pajak Reklame berpengaruh terhadap PAD Sleman

2) Menentukan taraf signifikansi menggunakan 0,05.

3) t hitung dan t kritis.

- t hitung dapat adalah 1,975 (lihat pada tabel 4.5)

- t kritis dapat dicari pada tabel statistik pada signifikansi $0,05/2$

$= 0,025$ (uji dua sisi) dengan $df = n-k-1$ (atau $60-5-1=54$) (k

adalah jumlah variabel bebas). Diperoleh t kritis ialah 2,00488

(dibulatkan menjadi 2,005).

4) Pengambilan keputusan

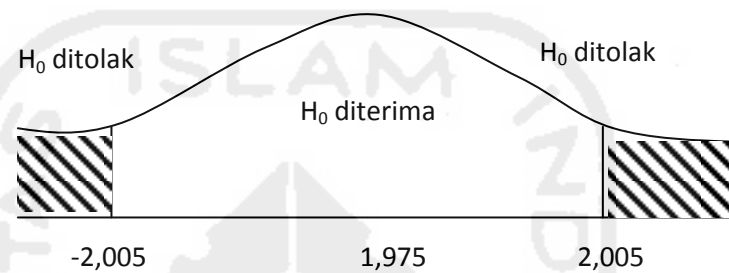
t hitung \leq t kritis maka H_0 diterima

t hitung $>$ t kritis maka H_0 ditolak

5) Kesimpulan

Diketahui nilai t hitung (1,975) < nilai t kritis (2,005). Jadi hipotesis nol diterima. Kesimpulannya, **Pajak Reklame tidak berpengaruh terhadap PAD Sleman.**

6) Gambar 4.5 Daerah Penerimaan dan Penolakan Uji t Pajak Reklame



Sumber: Data penelitian diolah, 2017

Pengambilan Keputusan berdasar Probabilitas (signifikansi)

1) Menentukan hipotesis nol dan hipotesis alternatif

$H_0 : b_1 = 0$; Pajak Reklame tak berpengaruh terhadap PAD Sleman

$H_a : b_1 \neq 0$; Pajak Reklame berpengaruh terhadap PAD Sleman

2) Menentukan probabilitas (signifikansi). Dari tabel Coefficients dapat diketahui bahwa probabilitas ialah 0,053.

3) Pengambilan keputusan

Probabilitas > 0,05 H_0 diterima

Probabilitas \leq 0,05 H_0 ditolak

4) Kesimpulan

Dapat diketahui bahwa probabilitas sebesar 0,053 lebih besar dari 0,05. Maka H_0 diterima. Kesimpulannya, **Pajak Reklame tidak berpengaruh terhadap PAD Sleman.**

b. Pengujian Pengaruh Pajak Restoran terhadap PAD Sleman

1) Menentukan hipotesis nol dan hipotesis alternatif

$H_0 : b_2 = 0$; Pajak Restoran tak berpengaruh terhadap PAD Sleman

$H_a : b_2 \neq 0$; Pajak Restoran berpengaruh terhadap PAD Sleman

2) Menentukan taraf signifikansi menggunakan 0,05.

3) t hitung dan t kritis.

- t hitung dapat adalah -0,022 (lihat pada tabel 4.1)

- t kritis dapat dicari pada tabel statistik pada signifikansi $0,05/2 = 0,025$ (uji dua sisi) dengan $df = n-k-1$ (atau $60-5-1=54$) (k adalah jumlah variabel bebas). Nilai t kritis ialah 2,005.

4) Pengambilan keputusan

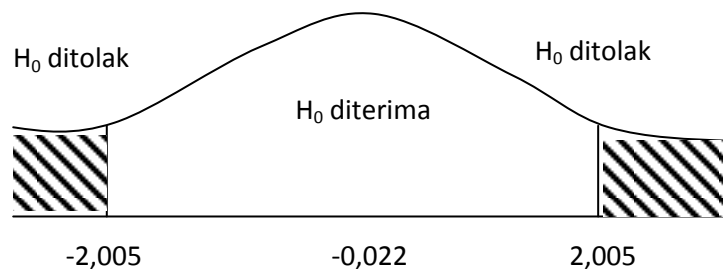
t hitung \leq t kritis maka H_0 diterima

t hitung $>$ t kritis maka H_0 ditolak

5) Kesimpulan

Dapat diketahui bahwa t hitung (-0,022) $<$ t kritis (2,005). Jadi hipotesis nol diterima. Kesimpulannya, **Pajak Restoran tidak berpengaruh terhadap PAD Sleman.**

6) Gambar 4.6 Daerah Penerimaan dan Penolakan Uji t Pajak Restoran



Sumber: Data penelitian diolah, 2017

Pengambilan Keputusan berdasar Probabilitas (signifikansi)

1) Menentukan hipotesis nol dan hipotesis alternatif

$H_0 : b_2 = 0$; Pajak Restoran tak berpengaruh terhadap PAD Sleman

$H_a : b_2 \neq 0$; Pajak Restoran berpengaruh terhadap PAD Sleman

2) Menentukan probabilitas (signifikansi). Dari tabel Coefficients dapat diketahui bahwa probabilitas ialah 0,982.

3) Pengambilan keputusan

Probabilitas $> 0,05$ H_0 diterima

Probabilitas $\leq 0,05$ H_0 ditolak

4) Kesimpulan

Dapat diketahui bahwa probabilitas sebesar 0,982 lebih besar dari 0,05. Maka H_0 diterima. Kesimpulannya, **Pajak Restoran tidak berpengaruh terhadap PAD Sleman.**

c. Pengujian Pengaruh Retribusi Jasa Umum terhadap PAD Sleman

1) Menentukan hipotesis nol dan hipotesis alternatif

$H_0 : b_3 = 0$; Retribusi Jasa Umum tidak berpengaruh terhadap PAD Sleman

$H_a : b_3 \neq 0$; Retribusi Jasa Umum berpengaruh terhadap PAD Sleman

2) Menentukan taraf signifikansi menggunakan 0,05.

3) t hitung dan t kritis.

- t hitung dapat adalah 4,148 (lihat pada tabel 4.1)
- t kritis dapat dicari pada tabel statistik pada signifikansi $0,05/2 = 0,025$ (uji dua sisi) dengan $df = n-k-1$ (atau $60-5-1=54$) (k adalah jumlah variabel bebas). Diperoleh t kritis ialah 2,005.

4) Pengambilan keputusan

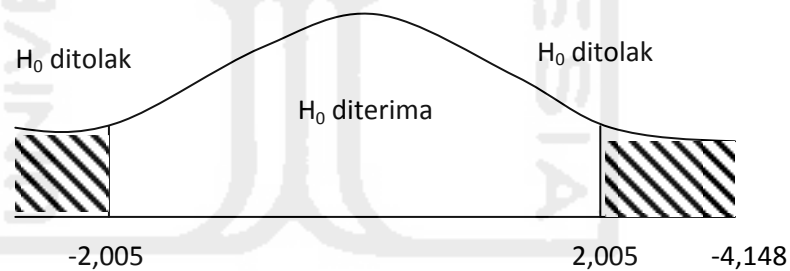
t hitung \leq t kritis maka H_0 diterima

t hitung $>$ t kritis maka H_0 ditolak

5) Kesimpulan

Dapat diketahui bahwa t hitung (4,148) $>$ t kritis (2,005). Jadi hipotesis nol ditolak. Kesimpulannya, **Retribusi Jasa Umum berpengaruh terhadap PAD Sleman.**

6) Gambar 4.7 Daerah Penerimaan dan Penolakan H_0



Sumber: Data penelitian diolah, 2017

Pengambilan Keputusan berdasar Probabilitas (signifikansi)

1) Menentukan hipotesis nol dan hipotesis alternatif

$H_0 : b_3 = 0$;Retribui Jasa Umum tidak berpengaruh terhadap PAD Sleman

$H_a : b_3 \neq 0$;Retribusi Jasa Umum berpengaruh terhadap PAD Sleman

2) Menentukan probabilitas (signifikansi). Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa probabilitas ialah 0,000.

3) Pengambilan keputusan

Probabilitas $> 0,05$ H_0 diterima

Probabilitas $\leq 0,05$ H_0 ditolak

4) Kesimpulan

Dapat diketahui bahwa probabilitas sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. Maka H_0 ditolak. Kesimpulannya, **Retribusi Jasa Umum berpengaruh terhadap PAD Sleman.**

d. Pengujian Pengaruh Jumlah Penduduk terhadap PAD Sleman

1) Menentukan hipotesis nol dan hipotesis alternatif

$H_0 : b_3 = 0$; Jumlah Penduduk tak berpengaruh terhadap PAD Sleman

$H_a : b_4 \neq 0$; Jumlah Penduduk berpengaruh terhadap PAD Sleman

2) Menentukan taraf signifikansi menggunakan 0,05.

3) t hitung dan t kritis.

- t hitung dapat adalah 1,494 (lihat pada tabel)

- t kritis dapat dicari pada tabel statistik pada signifikansi $0,05/2 = 0,025$ (uji dua sisi) dengan $df = n-k-1$ (atau $60-5-1=54$) (k adalah jumlah variabel bebas). Diperoleh t kritis ialah 2,00488 (dibulatkan menjadi 2,005).

4) Pengambilan keputusan

$t_{hitung} \leq t_{kritis}$ maka H_0 diterima

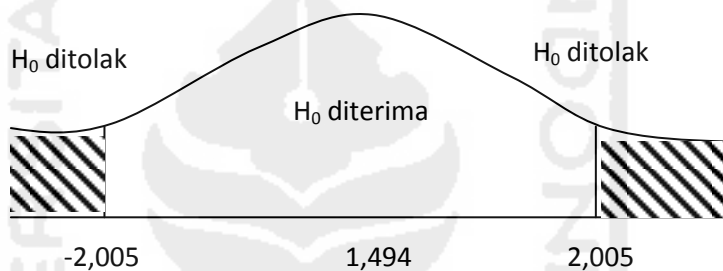
$t_{hitung} > t_{kritis}$ maka H_0 ditolak

5) Kesimpulan

Dapat diketahui bahwa t_{hitung} (1,494) < t_{kritis} (2,005). Jadi

hipotesis nol diterima. Kesimpulannya, **Jumlah Penduduk tidak berpengaruh terhadap PAD Sleman.**

6) Gambar 4.8 Daerah Penerimaan-Penolakan Uji t Jumlah Penduduk



Sumber: data penelitian diolah, 2017

Pengambilan Keputusan berdasar Probabilitas (signifikansi)

1) Menentukan hipotesis nol dan hipotesis alternatif

$H_0 : b_4 = 0$; Jumlah Penduduk tidak berpengaruh terhadap PAD Sleman

$H_a : b_4 \neq 0$; Jumlah Penduduk berpengaruh terhadap PAD Sleman

2) Menentukan probabilitas (signifikansi). Dari tabel Coefficients dapat diketahui bahwa probabilitas ialah 0,141.

3) Pengambilan keputusan

Probabilitas > 0,05 H_0 diterima

Probabilitas $\leq 0,05$ H_0 ditolak

4) Kesimpulan

Dapat diketahui bahwa probabilitas sebesar 0,141 lebih besar dari 0,05. Maka H_0 diterima. Kesimpulannya, **Jumlah Penduduk tidak berpengaruh terhadap PAD Sleman.**

e. Pengujian Pengaruh Jumlah Industri terhadap PAD Sleman

1) Menentukan hipotesis nol dan hipotesis alternatif

$H_0 : b_5 = 0$; Artinya Jumlah Industri tidak berpengaruh terhadap PAD Sleman

$H_a : b_5 \neq 0$; Jumlah Industri berpengaruh terhadap PAD Sleman

2) Menentukan taraf signifikansi menggunakan 0,05.

3) t hitung dan t kritis.

- t hitung dapat adalah 0,948 (lihat pada tabel Coefficients)

- t kritis dapat dicari pada tabel statistik pada signifikansi $0,05/2 = 0,025$ (uji dua sisi) dengan $df = n-k-1$ (atau $60-5-1=54$) (k adalah jumlah variabel bebas). Diperoleh t kritis ialah 2,005.

4) Pengambilan keputusan

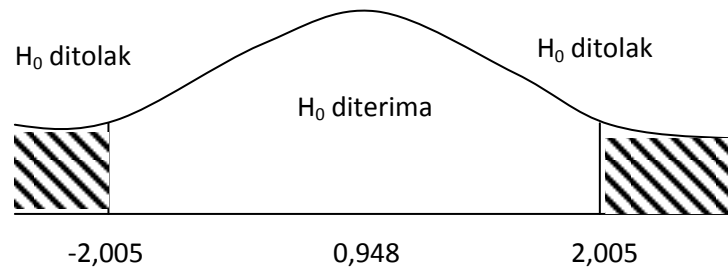
t hitung \leq t kritis maka H_0 diterima

t hitung $>$ t kritis maka H_0 ditolak

5) Kesimpulan

Dapat diketahui bahwa t hitung (0,948) $<$ t kritis (2,005). Jadi hipotesis nol diterima. Kesimpulannya, **Jumlah Industri tidak berpengaruh terhadap PAD Sleman.**

6) Gambar 4.9 Daerah Penerimaan-Penolakan Uji t Jumlah Industri



Sumber: Data penelitian diolah, 2017

Pengambilan Keputusan berdasar Probabilitas (signifikansi)

1) Menentukan hipotesis nol dan hipotesis alternatif

$H_0 : b_5 = 0$; Jumlah Industri tak berpengaruh terhadap PAD Sleman

$H_a : b_5 \neq 0$; Jumlah Industri berpengaruh terhadap PAD Sleman

2) Menentukan probabilitas (signifikansi). Dari tabel Coefficients dapat diketahui bahwa probabilitas ialah 0,347.

3) Pengambilan keputusan

Probabilitas $> 0,05$ H_0 diterima

Probabilitas $\leq 0,05$ H_0 ditolak

4) Kesimpulan

Dapat diketahui bahwa probabilitas sebesar 0,347 lebih besar dari 0,05. Maka H_0 diterima. Kesimpulannya, **Jumlah Industri tidak berpengaruh terhadap PAD Sleman.**

5. Pengujian Koefisien Determinasi

Analisis Koefisien Determinasi (R^2) digunakan untuk mengetahui seberapa besar persentase sumbangan pengaruh variabel bebas secara serentak

terhadap variabel terikat. Dari tabel 4.6 dapat diketahui nilai R^2 (*Adjusted R Square*) adalah 0,823. Jadi, sumbangan pengaruh dari variabel bebas yaitu sebesar 82,3%, sedangkan sisanya (17,7%) dipengaruhi oleh faktor (variabel) lain yang tidak diteliti.

Tabel 4.6. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics					Durbin-Watson
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change	
1	.915 ^a	.838	.823	6.774E9	.838	55.923	5	54	.000	1.988

a. Predictors: (Constant), JML_INDSTRI, PJK_REKLAME, RET_JASAUMUM, PJK_RESTORAN, JML_PDK

b. Dependent Variable: PAD_SLEMAN

Sumber: Data penelitian 2017, diolah

B. PEMBAHASAN

1. Pengaruh Pajak Reklame terhadap PAD Kabupaten Sleman

Hasil penelitian menegaskan pajak reklame tidak berpengaruh terhadap PAD Kabupaten Sleman. Ini dikarenakan masih terdapat banyak kelemahan dalam implementasi penarikan pajak reklame. Pajak reklame ialah pajak objektif yang dasar pengenaannya adalah nilai sewa reklame (NSR). NSR dipertimbangkan dengan memperhitungkan lokasi penempatan, jenis reklame, jangka waktu penyelenggaraan, dan ukuran media reklame. Keterbatasan aparat pajak, sumberdaya, pikiran, waktu, ataupun fasilitas penunjang kerja lainnya yang dipergunakan untuk mendata reklame, menetapkan reklame, memungut reklame dan mengawasi reklame yang tak berizin dan/atau tidak diperpanjang. Perlu pembenahan di segi ini.

2. Pengaruh Pajak Restoran terhadap PAD Kabupaten Sleman

Hasil penelitian menegaskan bahwa pajak restoran tidak berpengaruh terhadap PAD Sleman. Meskipun bisa dicermati bahwa realisasi penerimaan pajak restoran selalu bertambah dari waktu ke waktu (selama rentang penelitian 2011-2015). Berbagai persoalan yang mengemuka harus diatasi oleh Pemda Sleman. Misalnya, masalah ketepatan waktu dalam pembayaran pajak, penetapan mana saja restoran atau warung makan dan sejenisnya yang termasuk wajib pajak (mengacu pada ketentuan omzet per hari minimal Rp 600.000,00), pedagang musiman, pedagang kaki lima dll. Batasan omzet per hari Rp 600.000,00 dalam implementasi penarikan pajak restoran di lapangan acap mengundang persoalan, seperti bagaimana bila sebuah warung makan, kantin, restoran, bar atau sejenisnya mengalami pasang surut penerimaan. Artinya, ketika didata, mereka termasuk ke dalam wajib pajak. Namun, selang beberapa waktu kemudian, mereka mengalami kemunduran pendapatan. Persoalan lain ialah, di wilayah administratif Kabupaten Sleman, keberadaan warung makan, termasuk angkringan dan sejenisnya, sangat menjamur. Luar biasa banyaknya. Sangat boleh jadi, mereka bisa mencapai omzet Rp 600.000,00 per hari. Pertanyaannya ialah, apakah sekian banyak warung makan yang digolongkan sebagai restoran menurut Perda No 2 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran ini sudah didata, dimasukkan sebagai wajib pajak dan dipungut pajak setiap bulannya (sebesar 10%)?

3. Pengaruh Retribusi Jasa Umum terhadap PAD Kabupaten Sleman

Hasil penelitian menegaskan bahwa retribusi jasa umum adalah satu-satunya variabel bebas yang berpengaruh terhadap PAD Kabupaten Sleman. Menurut hemat peneliti, patut diduga temuan ini bermula dari pemilahan jenis-jenis retribusi jasa umum di wilayah administratif Kabupaten Sleman yang cukup rinci dan banyak. Ada delapan jenis retribusi jasa umum yang diberlakukan di Kabupaten Sleman. Delapan jenis retribusi jasa umum tersebut meliputi: retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pelayanan kesehatan di rumah sakit umum daerah, retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, retribusi penggantian biaya cetak KPT dan akta catatan sipil, retribusi pelayanan pemakaman dan penguburan mayat, retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum dan parkir khusus, retribusi pelayanan pasar, retribusi pengujian kendaraan bermotor, retribusi pelayanan pendidikan, dan retribusi pengolahan limbah cair.

Temuan terkait dengan hal ini ialah kenyataan bahwa di wilayah administratif Kabupaten Sleman, terdapat penduduk yang tinggal di sana namun dengan status kependudukan bukan warga Sleman. Fakta ini berkaitan erat dengan realita Sleman sebagai kota pelajar, dengan banyaknya sekolah dan perguruan tinggi. Dengan kata lain, yang tinggal di Sleman bukan saja warga asli Sleman (yang tercatat sebagai warga dengan KTP Sleman), melainkan juga para pendatang, yang khusus bermukim di Sleman selama beberapa waktu untuk keperluan belajar dan/atau bekerja. Kehadiran mereka mendorong tumbuhnya jasa-jasa terkait, seperti

kos/kontrakan, warung makan, tempat usaha seperti fotocopy dan penjilidan dan seterusnya. Tatkala warga pendatang ini keluar untuk makan atau jalan-jalan misalnya, dengan mengendarai kendaraan bermotor, mereka harus membayar tarif parkir dst.

4. Pengaruh Jumlah Penduduk terhadap PAD Kabupaten Sleman

Hasil penelitian menegaskan bahwa jumlah penduduk tidak berpengaruh terhadap PAD Kabupaten Sleman. Temuan ini sangat menarik. Di satu sisi, menurut hemat peneliti, mereka yang bermukim di wilayah administratif Kabupaten Sleman sangat banyak, melebihi data penelitian yang diperoleh. Di lain sisi, ternyata ada penggolongan kependudukan sebagai warga Sleman dan bukan warga Sleman, menurut kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil. Dengan kata lain, data penelitian yang diolah dalam penelitian ini hanyalah data penduduk Sleman yang tercatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, tidak mencakup warga pendatang, yang khusus bermukim di Sleman untuk keperluan belajar dan/atau bekerja. Padahal, kehadiran mereka di Sleman sangat berpeluang membuka potensi-potensi pajak baru atau meningkatkan pos-pos pajak yang sudah diberlakukan.

5. Pengaruh Jumlah Industri terhadap PAD Kabupaten Sleman

Hasil penelitian menegaskan bahwa jumlah industri tidak berpengaruh terhadap PAD Kabupaten Sleman. Berbeda dengan penelitian

Budi Waluyo, sebagaimana dipaparkan di bagian Penelitian Terdahulu di Bab 2, yang hanya memasukkan data jumlah industri besar saja, dalam penelitian ini, peneliti mencakup industri besar dan juga industri kecil dan menengah. Pertimbangan peneliti ialah meskipun secara satu persatu omzet industri kecil dan menengah belum sepadan dengan satu industri besar, namun secara bersama-sama, jumlah mereka akan signifikan juga. Maksud peneliti ialah sangat terbuka kemungkinan bahwa sepuluh atau dua puluh industri kecil dan menengah bisa setara dengan satu industri besar. Realita semacam ini harus diperhitungkan dalam sebuah penelitian. Dan peneliti sudah mencakupnya.

Pertimbangan ini bersesuaian dengan realita terkait warga pendatang yang bermukim di wilayah Sleman entah untuk keperluan belajar dan/atau bekerja. Belum lagi fakta-fakta relevan lainnya, seperti sebagian warga pendatang (bukan warga Sleman, menurut KTP) justru membuka unit-unit usaha di wilayah Sleman. Sepanjang melakukan pelacakan data, peneliti tidak mendapatkan larangan bagi warga pendatang untuk membuka industri dan/atau usaha tertentu di Sleman.

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Penelitian ini meneliti pengaruh lima variabel bebas (pajak reklame, pajak restoran, retribusi jasa umum, jumlah penduduk, dan jumlah industri) terhadap satu variabel terikat (pendapatan asli daerah) di wilayah administratif tingkat dua Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan rentang waktu penelitian selama lima tahun, dari 2011-2015. Beberapa poin kesimpulan yang bisa ditarik mencakup:

1. Pajak Reklame, Pajak Restoran, Retribusi Jasa Umum, Jumlah Penduduk dan Jumlah Industri secara bersama-sama berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sleman. Ini terlihat dari hasil uji F. Nilai F hitung sebesar 55,923. Lebih besar dari nilai F kritis (2,39).
2. Pajak reklame tidak berpengaruh terhadap PAD Kabupaten Sleman. Nilai t hitung untuk Pajak Reklame ialah 1,975, lebih kecil dari nilai t kritis 2,005.
3. Pajak restoran tidak berpengaruh terhadap PAD Kabupaten Sleman. Nilai t hitung untuk pajak restoran sebesar -0,022, lebih kecil dari t kritis 2,005.
4. Retribusi Jasa Umum berpengaruh terhadap PAD Kabupaten Sleman. Nilai t hitung untuk retribusi jasa umum sebesar 4,148, lebih besar dari t kritis 2,005.

5. Jumlah penduduk tidak berpengaruh terhadap PAD Kabupaten Sleman. Nilai t hitung untuk jumlah penduduk sebesar 1,494, lebih kecil dari nilai t kritis 2,005.
6. Jumlah industri tidak berpengaruh terhadap PAD Kabupaten Sleman. Nilai t hitung untuk jumlah industri sebesar 0,948, lebih kecil dari nilai t kritis 2,005.

B. Saran

1. Bagi peneliti dan penelitian selanjutnya agar mempersiapkan data – data yang di perlukan untuk kepentingan skripsi dengan sebaik mungkin, di karenakan dalam penelitian ini banyak menghabiskan waktu dalam proses pengumpulan data yang bersangkutan dengan skripsi.
2. Bagi instansi – instansi terkait, untuk memfokuskan pos – pos pendapatan yang tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah agar pemasukan dari pos – pos tersebut dapat meningkat secara maksimal dan berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah. DISPENDA dan DPKAD untuk fokus mendorong pajak – pajak yang tidak berpengaruh terhadap PAD kabupaten sleman agar di tahun – tahun berikutnya pendapatan tersebut meningkat dan berpengaruh terhadap PAD Kabupaten Sleman, seperti Pajak Restoran dan Pajak Reklame. Sedangkan DISPERINDAG harus lebih fokus lagi dalam peningkatan pelatihan – pelatihan yang dapat menumbuhkan minat untuk berwirausaha agar lahir industri – industri kreatif maupun industry besar yang berdampak terhadap jumlah industri yang ada di Kabupaten Sleman, dengan meningkatnya jumlah industri

dapat berpengaruh dengan terbukanya lapangan pekerjaan baru untuk warga yang berada di Kabupaten Sleman yang dapat meningkatkan pendapatan dan mengurangi angka pengangguran di Kabupaten Sleman yang berpengaruh terhadap Meningkatnya PAD Kabupaten Sleman.



DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 1993. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT Rineka Cipta
- Arikunto, Suharsimi. 1996. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT Rineka Cipta
- Bratakusumah, Deddy Supriady. 2002. *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. 2011. *Laporan Evaluasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sleman*. Data bulanan. Tidak diterbitkan. Yogyakarta: DPKAD Kabupaten Sleman
- Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. 2011. *Laporan Evaluasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sleman*. Data bulanan. Tidak diterbitkan. Yogyakarta: DPKAD Kabupaten Sleman
- Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. 2012. *Laporan Evaluasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sleman*. Data bulanan. Tidak diterbitkan. Yogyakarta: DPKAD Kabupaten Sleman
- Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. 2013. *Laporan Evaluasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sleman*. Data bulanan. Tidak diterbitkan. Yogyakarta: DPKAD Kabupaten Sleman
- Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. 2014. *Laporan Evaluasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sleman*. Data bulanan. Tidak diterbitkan. Yogyakarta: DPKAD Kabupaten Sleman
- Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. 2015. *Laporan Evaluasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sleman*. Data bulanan. Tidak diterbitkan. Yogyakarta: DPKAD Kabupaten Sleman
- Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman. 2016. *Laporan Data Kependudukan Kabupaten Sleman 2011-2015*. Data tahunan. Tidak diterbitkan. Yogyakarta: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman
- Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sleman. 2016. *Laporan Data Industri Kabupaten Sleman 2011-2015*. Data tahunan. Tidak diterbitkan. Yogyakarta: Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sleman

- Ghozali, Imam. 2005. *Aplikasi Analisis Multivarite dengan SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Cetakan 4
- Gujarati, Damodar. 1997. *Ekonometrika Dasar* (Sumarno Zein, penj). Jakarta: Penerbit Erlangga
- Hadi, Sutrisno. 1990. *Metodologi Research Jilid 3*. Yogyakarta: Andi Offset
- Karyani, Desak Made. 2012. *Pengaruh Retribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Dinas Pendapatan Kabupaten Morowali*. Skripsi. Tidak diterbitkan.
- Keputusan Bupati Sleman Nomor 70/Kep.KDH/A/2003 tentang Lokasi Reklame
- Keputusan Bupati Sleman Nomor 3/Kep.KDH/1/2004 tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
- Kuncoro, Mudrajat. 2001. *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN
- Kerlinger, Fred N. 1979. *Asas-asas Penelitian Behavioral*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Nugroho, D. Rianto. 2000. *Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Pemerintah Republik Indonesia. 1999. *Garis-garis Besar Haluan Negara 1999*
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 105 Tahun 2000 tentang Penyerahan atau Pelimpahan Kewenangan Pemerintah Pusat kepada Gubernur atau Bupati
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah
- Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 10 Tahun 1998 tentang Pajak Reklame
- Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 5 Tahun 2002 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Dati II Sleman Nomor 10 Tahun 1998 tentang Pajak Reklame
- Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 14 Tahun 2003 tentang Izin Reklame

Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Titik Reklame

Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame

Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2015 tentang Izin Pemanfaatan Ruang

Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran

Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 15 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Usaha Hiburan Umum, Rumah Makan, Restoran dan Hotel Pada Bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri

Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 5 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Pendidikan

Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Terminal

Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Trayek

Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Gangguan

Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan

Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar

Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengolahan Limbah Cair

- Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
- Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil
- Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
- Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
- Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 15 Tahun 2013 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir
- Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 16 Tahun 2013 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing
- Putranty, Mawar Dwi. 2008. *Pengaruh Penerimaan Pajak Reklame dan Pajak Resoran terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Suku Dinas Pendapatan Daerah Kodya Jakarta Barat II*. Skripsi. Tidak diterbitkan. Jakarta: Universitas Kristen Maranatha
- Rochimah, Siti dkk. 2013. *Pengaruh Pajak Hotel dan Restoran, Retribusi Daerah dan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Kabupaten/Kota Propinsi Jawa Tengah Tahun 2007-2012*. Skripsi. Tidak diterbitkan. Semarang: Jurnal Ilmiah Mahasiswa S1 Auntansi ISSN 2502-7697 Universitas Pandanaran
- Setyaningsih, Tri. 2009. *Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah: Studi tentang Strategi Peningkatan Penerimaan Sektor Pajak di Kabupaten Sleman*. Skripsi. Tidak diterbitkan. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
- Supriatna, Tjanya. 2001. *Sistem Administrasi Pemerintahan di Daerah*. Jakarta: Bumi Aksara
- Sofian, Syuhada. 1997. *Prospek dan Alternatif "Action Plan" Pemajakan Reklame daam Mendongkrak Pendapatan Asli Daerah Studi Kasus Kodya Semarang*. Skripsi. Tidak diterbitkan. Semarang: Gema Stikubank
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

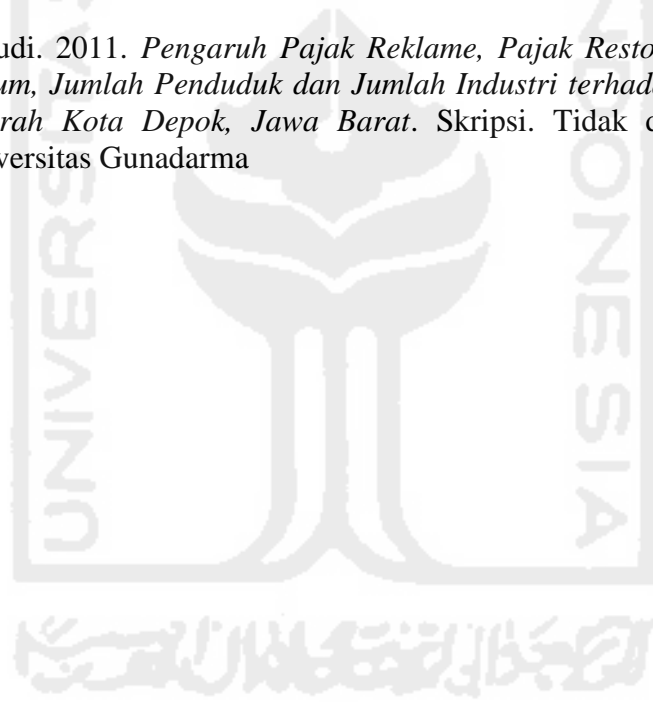
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Pemerintah Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas UU Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah

Wachdin, Faizah. 2010. *Pengaruh Pajak Reklame dan Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya, Studi Pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya*. Skripsi. Tidak diterbitkan. Surabaya: Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Waluyo, Budi. 2011. *Pengaruh Pajak Reklame, Pajak Restoran, Retribusi Jasa Umum, Jumlah Penduduk dan Jumlah Industri terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Depok, Jawa Barat*. Skripsi. Tidak diterbitkan. Jakarta: Universitas Gunadarma



LAMPIRAN-LAMPIRAN



Lampiran 1 Tabulasi Data Penelitian

DATA PENELITIAN 2011-2015						
PERIODE	PAJAK RESTORAN	PAJAK REKLAME	RETRIBUSI JASA UMUM	JUMLAH PENDUDUK	JUMLAH INDUSTRI	PENDAPATAN ASLI DAERAH
JANUARI 2011	986581136,97	556859588,80	2195512275,36	1094192	15404	11835228487,78
FEBRUARI 2011	960177804,54	582969830,58	797177634	1095293	15421	15392531735,35
MARET 2011	828961603,66	1407853356,33	984969875	1096473	15432	14147064001,80
Apr-11	912807410,55	470590212,48	971264947	1097678	15441	11952984106,82
MEI 2011	930255229,05	1150324917,98	965507438	1098667	15454	22336143614,80
JUNI 2011	1130181324,20	606232958,04	4005873928,67	1099710	15466	17973019945,93
JULI 2011	1078747909,20	467592987,99	4813168766,63	1100909	15482	19179757687,39
AGUSTUS 2011	1175063950,02	544488880,34	3847991426,45	1102054	15494	17966876999,29
Sep-11	1050575039,02	743575386,47	3588023301,06	1103243	15508	18471547638,68
OKTOBER 2011	1222002845,85	1353353574,00	3075913910,70	1104488	15522	19064636403,99
NOPEMBER 2011	1269270150,97	811079919,00	4388170445,72	1105679	15551	21966997863,18
DESEMBER 2011	1712723621,82	647035359,00	5996508654,71	1107304	15564	26734289221,46
JANUARI 2012	1224120927,25	1268458677,22	3219538928,80	1107905	15573	15598650244,45
FEBRUARI 2012	1289178278,82	750516873,00	3445430277	1108540	15596	18932869881,98
MARET 2012	1140082491,44	753339152,00	4107258964,84	1109139	15618	19593066325,53
Apr-12	1322081205,37	1526835365,50	4483126072,29	1109765	15642	22945403813,97
MEI 2012	1374247430,90	785902062,00	6306085034,24	1110376	15665	34301510810,60
JUNI 2012	1408668698,15	1108931053,00	6130861550,15	1111004	15687	27197770930,40
JULI 2012	1427066268,70	986322696,25	6776422679,94	1111633	15698	26137382921,63
AGUSTUS 2012	1341985701,80	578430810,00	4782988458,84	1112288	15719	21319979049,82
Sep-12	1614502146,64	712131322,25	6415095534,39	1112932	15742	24612900370,49
OKTOBER 2012	1410016527,10	743218627,50	10970900650	1113535	15764	26272924126,79
NOPEMBER 2012	1490255017,11	613450567,50	4154030915	1113937	15790	25407799426,00
DESEMBER 2012	1716677502,50	1512602817,00	12975728485,60	1114833	15835	38749759491,47
JANUARI 2013	1751093391,83	681570479,00	7973572019,05	1117137	15850	26914133841,77
FEBRUARI 2013	1522042952,33	1026555288,00	4049596137,68	1119393	15864	24205798929,74
MARET 2013	1337464640,06	945069403,00	9210581240,53	1121757	15878	31431588489,89
Apr-13	1777040663,86	644143941,00	4936474249	1123953	15891	41198387489,16
MEI 2013	1628412606,12	775729009,02	7678083044,87	1125931	15900	38614263486,54
JUNI 2013	1693994601,60	900897947,00	6000917388,81	1128386	15910	34921760619,71
JULI 2013	1813295649,43	1340985128,00	7471822097,85	1131041	15925	41392316958,09
AGUSTUS 2013	1591056923,54	779616837,00	5769834081,48	1132897	15936	40279823842,41
Sep-13	2100331238,13	1339571673,96	6897123849,91	1134900	15952	55692175761,99
OKTOBER 2013	1709740834,68	1276907271,00	10065742165,43	1137204	15966	45027788349,80
NOPEMBER 2013	1930458312,61	1118951388,50	6712214310	1139521	15973	35981719189,76
DESEMBER 2013	2189532136,53	1322056245,00	6597541700	1141733	15976	43523904389,97
JANUARI 2014	2196077500,16	728492397,50	7365938651	1143578	15984	30531413384,03
FEBRUARI 2014	1957321125,55	902503263,00	6049522161	1145474	15992	29321046442,76
MARET 2014	1796895214,33	1528602960,00	8491487835	1147378	16001	53476724895,82
Apr-14	2396352686,65	809016952,00	11165540031	1149177	16008	40905423251,37
MEI 2014	1979735519,20	548815341,00	10267717783,91	1150986	16017	46785812898,88

JUNI 2014	2352123794,95	947543560,00	14518607446,03	1152819	16026	52340871673,63
JULI 2014	2231378697,06	707839925,00	10721268716,17	1154721	16027	42668824122,67
AGUSTUS 2014	2306115766,82	977815928,50	9684771688,34	1156727	16048	47253041900,99
Sep-14	2727928133,24	1371636886,00	20179943799,52	1159290	16065	76336538791,12
OKTOBER 2014	2313712778,50	1098223705,00	8531363228,98	1161298	16074	46044461298,23
NOPEMBER 2014	2702331675,90	984333710,00	11680224059,86	1163084	16082	45937768662,99
DESEMBER 2014	3019643331,81	772786603,00	16628972195,62	1163970	16088	61585577789,22
JANUARI 2015	3128709735,57	1054863551,00	10666581039,02	1163972	16110	37546776372,53
FEBRUARI 2015	2777044896,14	895871614,00	11171349022,32	1163506	16132	41320551191,16
MARET 2015	2740478796,53	959804784,00	12789560006,48	1163795	16155	79104633494,59
Apr-15	3034395846,71	820740938,50	10579263031,29	1164031	16180	54368252993,26
MEI 2015	3141367722,06	517130612,00	11663689769,19	1164330	16212	47592924432,55
JUNI 2015	3450553660,17	849550879,00	13394946541,29	1164626	16230	53665707776,83
JULI 2015	3090864369,08	714441210,50	12776858884,88	1164825	16251	49133893981,84
AGUSTUS 2015	3762023431,98	630096568,00	9941277135,71	1165118	16277	51195646494,96
Sep-15	3451187386,83	679229446,50	12938106931,84	1165409	16304	67357935853,01
OKTOBER 2015	3105395498,71	745907180	12327593948,23	1165714	16327	52252119345,73
NOPEMBER 2015	3473188735,03	738423158,00	10968996793,20	1166015	16351	49274896967,85
DESEMBER 2015	3988643984,71	639204731,00	14407893193,04	1167481	16383	60366781908,21



Lampiran 2 Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics					Durbin-Watson
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change	
1	.915 ^a	.838	.823	6.774E9	.838	55.923	5	54	.000	1.988

a. Predictors: (Constant), JML_INDSTRI, PJK_REKLAME, RET_JASAUMUM, PJK_RESTORAN, JML_PDK

b. Dependent Variable: PAD_SLEMAN

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1.283E22	5	2.566E21	55.923	.000 ^a
	Residual	2.478E21	54	4.589E19		
	Total	1.531E22	59			

a. Predictors: (Constant), JML_INDSTRI, PJK_REKLAME, RET_JASAUMUM, PJK_RESTORAN, JML_PDK

b. Dependent Variable: PAD_SLEMAN

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	-4.115E11	1.442E11		-2.854	.006		
	PJK_REKLAME	6.398	3.240	.115	1.975	.053	.885	1.130
	PJK_RESTORAN	-.075	3.371	-.004	-.022	.982	.102	9.777
	RET_JASAUMUM	1.597	.385	.416	4.148	.000	.298	3.360
	JML_PDK	212389.446	142158.381	.332	1.494	.141	.061	16.495
	JML_INDSTRI	1.194E7	1.260E7	.204	.948	.347	.065	15.391

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	-4.115E11	1.442E11		-2.854	.006		
	PJK_REKLAME	6.398	3.240	.115	1.975	.053	.885	1.130
	PJK_RESTORAN	-.075	3.371	-.004	-.022	.982	.102	9.777
	RET_JASAUMUM	1.597	.385	.416	4.148	.000	.298	3.360
	JML_PDK	212389.446	142158.381	.332	1.494	.141	.061	16.495
	JML_INDSTRI	1.194E7	1.260E7	.204	.948	.347	.065	15.391

a. Dependent Variable: PAD_SLEMAN

Collinearity Diagnostics^a

Model	Dimensi on	Eigenvalue	Condition Index	Variance Proportions					
				(Constant)	PJK_REKLAME	PJK_RESTORAN	RET_JASAUMUM	JML_PDK	JML_INDSTRI
1	1	5.666	1.000	.00	.00	.00	.00	.00	.00
	2	.232	4.946	.00	.06	.01	.12	.00	.00
	3	.074	8.726	.00	.67	.01	.09	.00	.00
	4	.028	14.219	.00	.21	.30	.68	.00	.00
	5	2.851E-5	445.793	.69	.05	.61	.09	.47	.01
	6	1.277E-5	666.077	.31	.00	.07	.00	.53	.99

a. Dependent Variable: PAD_SLEMAN

Residuals Statistics^a

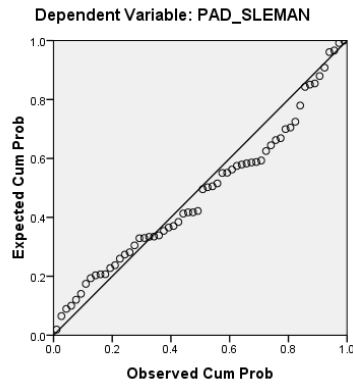
	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	N
Predicted Value	1.02E10	6.73E10	3.66E10	1.475E10	60
Residual	-1.406E10	2.418E10	.000	6.481E9	60
Std. Predicted Value	-1.789	2.086	.000	1.000	60
Std. Residual	-2.076	3.570	.000	.957	60

Residuals Statistics^a

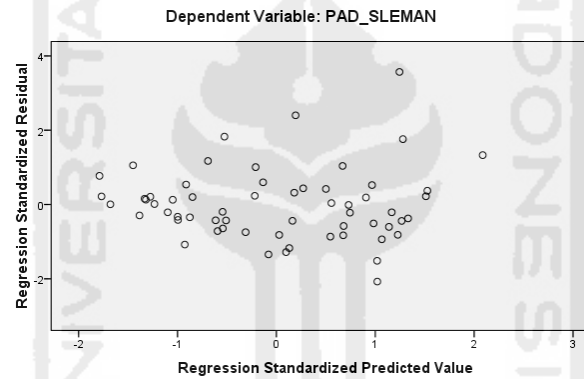
	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	N
Predicted Value	1.02E10	6.73E10	3.66E10	1.475E10	60
Residual	-1.406E10	2.418E10	.000	6.481E9	60
Std. Predicted Value	-1.789	2.086	.000	1.000	60
Std. Residual	-2.076	3.570	.000	.957	60

a. Dependent Variable: PAD_SLEMAN

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Scatterplot



Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	-4.115E11	1.442E11		-2.854	.006		
	PJK_REKLAME	6.398	3.240	.115	1.975	.053	.885	1.130
	PJK_RESTORAN	-.075	3.371	-.004	-.022	.982	.102	9.777

RET_JASAUMUM	1.597	.385	.416	4.148	.000	.298	3.360
JML_PDK	212389.446	142158.381	.332	1.494	.141	.061	16.495
JML_INDSTRI	1.194E7	1.260E7	.204	.948	.347	.065	15.391

a. Dependent Variable: PAD_SLEMAN



Lampiran 3 Surat Permohonan Pengambilan Data



UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA FAKULTAS EKONOMI

Condong Catur, Depok, Sleman, Yogyakarta 55283
Telepon (0274) 881546 - 883087 - 885376 Fax. : 882589

Nomor : 225/DEK/10/Div.SDM/IX/2016
Hal : PERMOHONAN IJIN PENELITIAN

02 September 2016

Kepada Yth.

Assalamu'alaikum wr.wb.

Diberitahukan dengan hormat, bahwa mahasiswa sebelum mengakhiri pendidikan di Fakultas Ekonomi UII Yogyakarta diwajibkan membuat karya ilmiah berupa riset/penelitian. Sehubungan dengan hal itu mahasiswa kami :

Nama : Irfan Muslim
No. Mahasiswa : 09 312 480
Jurusan : Akuntansi
Alamat : PERUM GRIYA KEMBANG PUTIH, JALAN BUGISAN NO 30
PAJANGAN, BANTUL, YOGYAKARTA

Bermaksud mohon keterangan/data pada Instansi/Perusahaan yang Saudara pimpin untuk keperluan menyusun skripsi dengan judul :

"Pengaruh Pajak Reklame, Pajak Restoran, Retribusi Jasa Umum, Jumlah Penduduk, Dan Jumlah Industri Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010 - 2014"

Dosen Pembimbing : Yunan Najamudin, Drs., MBA.

Hasil karya ilmiah tersebut semata-mata bersifat dan bertujuan keilmuan dan tidak disajikan kepada pihak luar. Oleh karena itu kami mohon perkenan Saudara untuk dapat memberikan data /keterangan yang diperlukan oleh mahasiswa tersebut.

Atas perkenan dan bantuan Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb

Dekan,

Dr. D. Agus Harjito, M.Si.
NIK : 87 311 0103



Lampiran 4 Surat Permohonan Pengambilan Data



UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA FAKULTAS EKONOMI

Condong Catur, Depok, Sleman, Yogyakarta 55283
Telepon (0274) 881546 - 883087 - 885376 Fax. : 882589

Nomor : 244/DEK/10/Div.SDM/IX/2016
Hal : PERMOHONAN PENGAMBILAN DATA

28 September 2016

Kepada Yth.
Kepala Kantor Badan Pusat Statistik
Kabupaten Sleman

Assalamu'alaikum wr.wb.

Diberitahukan dengan hormat, bahwa mahasiswa sebelum mengakhiri pendidikan di Fakultas Ekonomi UII Yogyakarta diwajibkan membuat karya ilmiah berupa riset/penelitian. Sehubungan dengan hal itu mahasiswa kami :

Nama : Irfan Muslim
No. Mahasiswa : 09312480
Jurusan : Akuntansi
Alamat : Perum Griya Kembang Putih, Jalan Paku Ningratan No 2 Bantul Yogyakarta

Bermaksud mohon keterangan/data pada Instansi/Perusahaan yang Saudara pimpin untuk keperluan menyusun skripsi dengan judul :

"Pengaruh Pajak Reklame, Pajak Restoran, Retribusi Jasa Umum, Jumlah Penduduk dan Jumlah Industri Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010- 2014 "

Dosen Pembimbing : Yunan Najamudin, Drs., MBA.

Hasil karya ilmiah tersebut semata-mata bersifat dan bertujuan keilmuan dan tidak disajikan kepada pihak luar. Oleh karena itu kami mohon perkenan Saudara untuk dapat memberikan data /keterangan yang diperlukan oleh mahasiswa tersebut.

Atas perkenan dan bantuan Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb

Delan



Dr. D. Agus Harjito, M.Si

Lampiran 5 Surat Izin Pengambilan Data



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jalan Parasamya Nomor 1 Beran, Tridadi, Sleman, Yogyakarta 55511
Telepon (0274) 868800, Faksimilie (0274) 868800
Website: www.bappeda.slemankab.go.id, E-mail : bappeda@slemankab.go.id

PAK SIFAN

SURAT IZIN

Nomor : 070 / Bappeda / 3643 / 2016

TENTANG PENELITIAN

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Dasar : Peraturan Bupati Sleman Nomor : 45 Tahun 2013 Tentang Izin Penelitian, Izin Kuliah Kerja Nyata, Dan Izin Praktik Kerja Lapangan.
Menunjuk : Surat dari Kepala Kantor Kesatuan Bangsa Kab. Sleman
Nomor : 070/Kesbang/3498/2016 Tanggal : 17 Oktober 2016
Hal : Rekomendasi Pengambilan Data

MENGIZINKAN :

Kepada :
Nama : IRFAN MUSLIM
No.Mhs/NIM/NIP/NIK : 09312480
Program/Tingkat : S1
Instansi/Perguruan Tinggi : Universitas Islam Indonesia Yogyakarta
Alamat instansi/Perguruan Tinggi : Jl. Kaliurang Km 14,5 Yogyakarta
Alamat Rumah : Sukaharja Delta Pawan Ketapang Kalbar
No. Telp / HP : 085643087746
Untuk : Mengadakan Penelitian / Pra Survey / Uji Validitas / PKL dengan judul
PENGARUH PAJAK REKLAME, PAJAK RESTORAN, RETRIBUSI JASA UMUM, JUMLAH PENDUDUK DAN JUMLAH INDUSTRI TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KABUPATEN SLEMAN DIY TAHUN 2010-2014
Lokasi : DIPENDA DAN BPS Kab. Sleman
Waktu : Selama 1 Bulan mulai tanggal 17 Oktober 2016 s/d 17 November 2016

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Wajib melaporkan diri kepada Pejabat Pemerintah setempat (Camat/ Kepala Desa) atau Kepala Instansi untuk mendapat petunjuk seperlunya.
2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan setempat yang berlaku.
3. Izin tidak disalahgunakan untuk kepentingan-kepentingan di luar yang direkomendasikan.
4. Wajib menyampaikan laporan hasil penelitian berupa 1 (satu) CD format PDF kepada Bupati diserahkan melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
5. Izin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan di atas.

Demikian izin ini dikeluarkan untuk digunakan sebagaimana mestinya, diharapkan pejabat pemerintah/non pemerintah setempat memberikan bantuan seperlunya.

Setelah selesai pelaksanaan penelitian Saudara wajib menyampaikan laporan kepada kami 1 (satu) bulan setelah berakhirnya penelitian.

Dikeluarkan di Sleman

Pada Tanggal : 17 Oktober 2016

a.n. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Tembusan :

1. Bupati Sleman (sebagai laporan)
2. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kab. Sleman
3. Kepala Dinas Kebudayaan & Pariwisata Kab. Sleman
4. Kepala Dinas Perindagkop Kab. Sleman
5. Kepala BPS Kab. Sleman
6. Dekan Fak. Ekonomi UII
7. Yang Bersangkutan

Sekretaris

Kepala Bidang Statistik, Penelitian, dan Perencanaan



ERIK W. MARYATUN, S.I.P, MT

Pembina, IV/a

NIP 19720411 199603 2 003

